

**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 1

TAHUN 2005

SERI : E Nomor 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 01 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17  
TAHUN 2001 TENTANG RENCANA STRATEGIK  
PEMBANGUNAN  
DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2001-2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencapaian visi misi pembangunan daerah sebagai penjabaran Poldas dan Propeda secara lebih konkrit maka perlu dilakukan analisis atas kebijakan program dalam berbagai bidang;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi Pembangunan Daerah perlu dilakukan perubahan atau penyempurnaan dalam rangka kelanjutan penyelenggaraan pembangunan di Propinsi Sulawesi Tengah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2006);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 Nomor 9 Seri D Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**DAN**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN  
2001 TENTANG RENCANA STRATEJIK  
PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI SULAWESI  
TENGAH TAHUN 2004-2006.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi tengah Tahun 2001 Nomor 9 Seri D Nomor 6) diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan pasal 3**

Sistematika Renstra Tahun 2001-2006 sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan**

**BAB I : Analisis Situasi**

**BAB III : Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan Umum  
dan Prioritas Pembangunan Daerah**

**BAB IV : Arah Kebijakan dan Program Pembangunan**

**BAB V : Pengukuran dan Evaluasi Kinerja**

**BAB VI : Matriks Program dan Kegiatan  
Pembangunan 2001-2006**

**BAB VI : Penutup**

**2. Ketentuan Pasal 4**

Materi RENSTRA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 18 Januari 2005

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**ttd + cap**

**AMINUDDIN PONULELE**

Diundangkan di Palu  
Pada tanggal 18 Januari 2005

**SEKERTARIS DAERAH PROPINSI  
SULAWESI TENGAH**

**ttd + cap**

**G U M Y A D I**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1  
TAHUN 2005 SERI E NOMOR 1**

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 5  
TAHUN 2005 SERI E NOMOR 2**

Lampiran : Peraturan Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Nomor : 01 Tahun 2005  
Tanggal : 18 Januari 2005

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Umum**

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

RENSTRA Provinsi Sulawesi Tengah memuat kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan dan sebagai upaya mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan, baik dalam lingkup kabupaten dan kota, lintas kabupaten dan kota, sektoral maupun lintas sektoral, sekaligus sebagai rencana taktis strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan layanan kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

RENSTRA ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, PERDA Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006 dan PERDA Nomor 9 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagai penjabaran POLDAS dan PROPEDA secara lebih konkrit maka perlu dilakukan pemilihan atas kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam kerangka inilah disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006.

Memasuki tahun ketiga masa jabatan Gubernur Sulawesi Tengah wacana mengenai Penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah muncul kepermukaan menjadi topik bahasan yang sangat menarik. Banyak terjadi perubahan yang pada mulanya tidak terjangkau dalam penyusunan Rencana Strategis Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006. Oleh karena itu, sudah waktunya dilakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dalam bentuk Penyempurnaan-Penyempurnaan terhadap berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam RENSTRA tersebut.

Penyempurnaan dimaksud didasari oleh beberapa alasan, antara lain :

1. Kenyataan yang ada memberi pembelajaran kepada kita bahwa dalam perjalanan waktu tiga tahun terakhir, terdapat banyak dinamika dan perubahan yang terjadi dan perlu disahuti, khususnya yang telah menjadi program nasional, seperti Program Pengentasan Kemiskinan dan program yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2004;
2. Beberapa program dan kegiatan yang sampai menjelang tahun ketiga masa jabatan Gubernur Sulawesi Tengah, belum diimplementasikan dengan "tajam" oleh dinas/badan/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain : Penguatan Kelembagaan Pemda, Evaluasi Peraturan Daerah (PERDA) yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi mutakhir, Pemberdayaan Hukum Adat, Pemberdayaan kelembagaan dan aparat pemerintah kabupaten baru;

3. Adanya program dan kegiatan yang karena kekurangan atau ketiadaan dana untuk melaksanakannya sehingga perlu dipikirkan untuk ditinjau kembali keberadaannya dalam RENSTRA tersebut;
4. Adanya program dan kegiatan yang seharusnya dan telah dibiayai melalui Anggaran Dekonsentrasi sehingga tidak perlu menjadi beban APBD;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, dengan nomenklatur yang berbeda dari nomenklatur pembidangan yang digunakan dalam RENSTRA.

Penyempurnaan dimaksud bukan pada substansi RENSTRA (Visi, Misi, Strategi) melainkan pada program dan kegiatan yang diperlukan.

Penyempurnaan RENSTRA ini sangat penting mengingat program dan kegiatan dalam RENSTRA menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD dan pembahasan legislatif atas RAPBD. Berdasarkan lembar isian yang disampaikan kepada dinas / badan / satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang program maupun kegiatan serta target yang ditetapkan dalam RENSTRA diperoleh masukan mengenai pentingnya Penyempurnaan Rencana Strategis Daerah dalam kerangka penyuksesan penyelenggaraan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyempurnaan RENSTRA ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyahuti berbagai program dan kegiatan yang tidak terdapat dalam RENSTRA namun merupakan program dan kegiatan yang penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan misi daerah.

Tujuannya adalah mengarahkan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga bisa lebih sesuai dalam upaya melaksanakan Misi Daerah Sulawesi Tengah sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Provinsi Sulawesi Tengah.

## **B. Pengertian**

Rencana Strategis adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah.

RENSTRA akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD, Strategi dan Prioritas APBD, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai kebutuhan daerah dengan mengacu pada POLDAS dan PROPEDA.

Dalam pengertian tersebut di atas, maka penyempurnaan Rencana Strategis akan digunakan sebagai rujukan untuk penyusunan AKU APBD, Strategi dan Prioritas APBD dan RAPBD Tahun 2005 serta menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang bersangkutan dan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup RENSTRA Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006 mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari aspek birokrasi pemerintahan, politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, agama, keamanan dan ketertiban serta penataan ruang.



#### **D. Kedudukan dan Fungsi**

Rencana Strategis Daerah berkedudukan dan memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan visi dan misi pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang dituangkan ke dalam rencana program dan kegiatan lima tahun daerah;
- 2) Menguraikan rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD dan dalam skala prioritas dengan memberikan penekanan pada program dan kegiatan yang berimplikasi pada rencana pendapatan dan belanja daerah;
- 3) Merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan kinerja Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan, dengan menggunakan lima indikator, yaitu : masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

#### **E. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan perubahan RENSTRA Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

- 1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program serta kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
- 2) Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang telah dibahas secara partisipatif antar seluruh pelaku pembangunan daerah, mulai dari saat menyusun POLDAS, penguangannya ke dalam. PROPEDA dan RENSTRA sampai dengan penjabarannya ke dalam Repetada dan RAPBD.

## **F. Landasan Penyusunan**

RENSTRA Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- 1) Landasan Idiil : Pancasila
- 2) Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 beserta Perubahannya
- 3) Landasan Operasional : Garis - Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004, Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, . Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2001-2006 dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Sulawesi Tengah 2001-2006.

## **G. Sistematika Penyusunan**

- BAB I : Pendahuluan, yang berisi : Umum, Pengertian, Ruang Lingkup, Kedudukan dan Fungsi, Maksud dan Tujuan, Landasan Penyusunan dan Sistematika Penyusunan
- BAB II : Analisis Situasi, menggambarkan Kondisi Umum, Kondisi Internal dan Kondisi Eksternal, serta Proyeksi Pertumbuhan dan PDRB serta Permasalahan Pembangunan
- BAB III : Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan Umum dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB IV : Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
- BAB V : Pengukuran dan Evaluasi Kinerja, yang memuat Kerangka Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja, Kesimpulan Hasil Evaluasi Kinerja dan Analisis Pencapaian Akuntabilitas Kinerja.
- BAB VI : Matriks Program dan Kegiatan Pembangunan 2001 – 2006 Provinsi Sulawesi Tengah
- BAB VII : Penutup

## **BAB II**

### **ANALISIS SITUASI**

#### **A. Kondisi Umum**

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, memiliki luas wilayah daratan 68.033 km<sup>2</sup> atau 35,96 persen dari Luas Pulau Sulawesi dan perairan laut seluas 193.923,75 km<sup>2</sup>. Posisi geografis terletak antara batas koordinat 2° 22' Lintang Utara dan 3° 48' Lintang Selatan serta 119° 22' dan 124° 22' Bujur Timur. Batas administrasi meliputi: Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Utara serta Provinsi Gorontalo; Sebelah Timur dengan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara; Sebelah Selatan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan Sebelah Barat dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Administrasi Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 secara berjenjang terdiri atas 7 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota, 70 wilayah kecamatan, 132 wilayah kelurahan dan 1.280 wilayah desa (termasuk 2 desa persiapan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong terdiri atas 8 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 9 kabupaten dan 1 kota yang meliputi 90 kecamatan, 132 Kelurahan dan 1.341 desa (termasuk 41 UPT).

Jumlah Penduduk dalam kurun waktu 1995-2000 mengalami peningkatan dari 1.896.724 jiwa menjadi 2.079.201 jiwa, Kepadatan penduduk rata-rata mencapai 30 jiwa per kilometer persegi. Konsentrasi penduduk tertinggi berada di wilayah Kota Palu dengan kepadatan mencapai 679 jiwa per kilometer persegi dan terendah di Kabupaten Morowali yaitu 10 jiwa per kilometer persegi. Sedang tahun 2003 jumlah penduduk bertambah menjadi 2.242.914 jiwa, kepadatan penduduk rata-rata mencapai 32 jiwa per kilometer persegi. Konsentrasi

penduduk tertinggi berada di wilayah Kota Palu dengan kepadatan mencapai 713 jiwa per kilometer persegi dan terendah di Kabupaten Morowali yaitu 11 jiwa per kilometer persegi.

Interaksi antara wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi lainnya di Sulawesi serta daerah lainnya di Indonesia, dimungkinkan dengan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan darat Trans-Sulawesi, prasarana dan sarana perhubungan laut serta udara yang semakin memadai. Lancarnya komunikasi lokal, interlokal maupun internasional ditunjang dengan tersedianya jaringan telekomunikasi serta fasilitas internet, meskipun masih terkonsentrasi pada ibukota provinsi dan kabupaten/kota.

Khusus mengenai prasarana perhubungan darat, panjang jalan pada Tahun 2000 tercatat 10.814,27 km yang terdiri atas: jalan Negara sepanjang 1.593,00 km, jalan Provinsi sepanjang 2.037,06 km dan jalan kabupaten sepanjang 7.184,21 km. Kondisi jalan tersebut khususnya Jalan Negara dan Provinsi yang terkategori baik adalah sepanjang 499,44 km (jalan Negara 319,39 km dan jalan Provinsi 180,05 km), berkategori sedang sepanjang 1.838,57 km (jalan Negara 729,72 km dan jalan Provinsi 1.108,85 km), berkategori rusak ringan sepanjang 711,97 km, (jalan Negara 476,31 km dan jalan Provinsi 235,66 km), dan berkategori rusak berat sepanjang 580,08 km (jalan Negara 67,58 km dan jalan Provinsi 512,50 km).

Jaringan irigasi yang terbangun telah mampu berfungsi mengairi lahan sawah seluas 79.606 ha atau sebesar 63,34 persen dari total luas areal persawahan Tahun 1999, dan tahun 2003 telah mampu mengairi 87.272 ha atau 65,06 persen.

Berdasarkan perkembangan distribusi PDRB atas dasar harga konstan 1993, menunjukkan tiga sektor ekonomi yang mempunyai peran terbesar dalam PDRB Tahun 2000. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB dengan kontribusi 47,68 persen, diikuti oleh sektor jasa-jasa 12,73 persen serta sektor perdagangan, hotel dan restoran

12,02 persen. Sektor lainnya yang cukup dominan adalah sektor angkutan dan komunikasi sebesar 7,44 persen, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian; listrik dan air bersih serta keuangan dan jasa perusahaan masing-masing memberikan kontribusi kurang dari 7,00 persen.

Sementara tahun 2003 kontribusi sektor pertanian naik menjadi 49,13 persen, sektor jasa-jasa tidak mengalami pergeseren, hanya pada sektor perdagangan, hotel dan restoran menurun menjadi 11,53 persen, sektor angkutan dan komunikasi menurun menjadi 6,94 persen, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian; listrik dan air bersih serta keuangan dan jasa perusahaan menurun sebesar 4,00 persen.

Kesejahteraan sosial masyarakat yang diukur berdasarkan derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dari indikator utama, yaitu angka kematian bayi dan angka harapan hidup, di samping angka kesakitan. Angka Kematian Bayi Tahun 1999 sebanyak 61 per 1000 kelahiran, dan menurun menjadi 52 per 1000 kelahiran pada Tahun 2002-2003. Angka Harapan Hidup pada tahun 1999 tercatat 63 tahun, naik menjadi 63,3 tahun pada tahun 2002. Sementara persentase penduduk yang menderita keluhan sakit mencapai 29,2 persen pada Tahun 1999 menurun kembali menjadi 27,15 persen pada Tahun 2003. Keseluruhan indikator di atas menunjukkan bahwa pada masa krisis terjadi penurunan derajat kesehatan penduduk dan mulai berangsur membaik pada masa pemulihan.

Tingkat pendidikan masyarakat menunjukkan kondisi yang lebih membaik, penduduk yang tidak dapat menulis dan membaca 5,03 persen tahun 1999 naik menjadi 7,73 persen pada Tahun 2001, pada Tahun 2003 menurun 6,37 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang Sekolah Dasar meningkat dari 93,94 Tahun 2001 menjadi 96,60 Tahun 2003, tingkat SLTP meningkat dari 69,56 menjadi 72,82.

Indikator Kesejahteraan Rakyat menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Rumahtangga yang menghuni rumah dengan luas lantai di atas 50 meter persegi padu tahun 2000 sejumlah 49,88 persen, menurun menjadi

44,05 persen pada Tahun 2002 dan meningkat lagi menjadi 46,42 persen Tahun 2003. Rumah yang berdinding tembok meningkat dari 41,70 persen pada Tahun 2000 menjadi 42,36 persen pada tahun 2003;. Rumah tangga yang mendiami rumah berlantai tanah di Tahun 1996 sebanyak 18,2 persen menurun menjadi 15,02 persen pada Tahun 2003. Penggunaan atap dedaunan pada bangunan rumah penduduk menunjukkan penurunan, yaitu dari 31,1 persen pada Tahun 2000 menjadi 29,25 persen pada Tahun 2003. penggunaan fasilitas penerangan listrik meningkat dari 63,02 persen Tahun 2000 menjadi 63,19 persen Tahun 2003. Konsumsi air bersih cenderung semakin mengarah pada pemanfaatan air ledeng, pompa, mata air dan sumur terlindung. Tahun 2000 pengguna sarana tersebut baru mencapai 70,20 persen, namun pada Tahun 2003 telah mencapai 87,17 persen rumah tangga.

Keamanan dan ketertiban umum mengalami distorsi yang terindikasi oleh adanya pengungsian penduduk dari daerah asalnya yang disebabkan oleh kerusakan di Kabupaten Poso serta musibah bencana alam. peristiwa yang sangat memilukan ini secara simultan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya pada lokasi terjadinya peristiwa tersebut. Berbagai fasilitas layanan publik (masyarakat) yang vital mengalami kerusakan, permukiman penduduk musnah dan banyaknya pengungsi akibat musibah tersebut.

## **B. Kondisi Internal dan Eksternal**

Berbagai perubahan dan kecenderungan lingkungan strategis, baik dalam skala global, regional, nasional maupun lokal, bagaimanapun bentuknya akan berpengaruh baik langsung maupun tidak terhadap kelangsungan dan proses pembangunan daerah.

Dalam lingkup global, dinamika lingkungan strategis yang dipicu oleh kecenderungan perdagangan global, pesatnya kemajuan teknologi, tuntutan dan kesadaran masyarakat akan demokrasi dan HAM. Dinamika tersebut selain mengharuskan kesiapan yang memadai, baik berupa kelembagaan dan regulasi maupun sarana dan prasarana lainnya (transportasi, peran perkotaan, dan komunikasi), juga kesiapan sumberdaya manusia yang mampu berkompetisi.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mampu berperan sebagai fasilitator yang baik dalam mengatur dan mendorong agar pembangunan daerah dapat tumbuh secara signifikan. Di samping itu, juga dibutuhkan upaya antisipasi dalam pengelolaan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan serta upaya memperkuat tata nilai budaya dan kearifan lokal sebagai perisai.

Dalam lingkup regional, dinamika lingkungan, strategis mengarah pada kesepakatan hubungan kerjasama kawasan antarregional negara yang berbatasan dengan wilayah yurisdiksi Negara Indonesia, khususnya yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dinamika tersebut dinilai sangat strategis menjadi pasar barang dan jasa serta produk unggulan lainnya dari masing-masing negara yang memberi nilai tambah bagi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

Regionalisasi tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa untuk mengoptimalkan potensi bersama menghadapi globalisasi, perlu upaya pengelompokan negara-negara dalam suatu kawasan, lebih-lebih dalam menghadapi sumberdaya yang semakin langka, ikatan kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan eksploitasi sumberdaya alam yang saling menguntungkan semakin diperlukan. Kondisi demikian perlu dicermati guna mencegah terjadinya intervensi pihak luar yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam lingkup nasional, dinamika lingkungan strategis dapat berpengaruh terhadap proses pembangunan daerah melalui beberapa perubahan yang dinilai strategis, yaitu :

- a. Implementasi otonomi daerah dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan kemandirian daerah sesuai dengan hak otonomi yang dimilikinya. Menjadi peluang bilamana daerah mampu mengelola dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya seluruh potensi yang ada. Sebaliknya menjadi tantangan jika

sumberdaya yang tersedia tidak mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, khususnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

- b. Perubahan sistem dalam kehidupan politik dan tumbuh suburnya berbagai jenis kelembagaan politik dan kemasyarakatan dewasa ini pada prinsipnya sangat diharapkan menjadi media yang efektif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta menjadi sarana bagi penciptaan nuansa kehidupan yang demokratis. Akan tetapi kecenderungan yang muncul, kelembagaankelembagaan yang ada justru belum mampu melaksanakan fungsinya sebagaimana yang diharapkan, dan bahkan cenderung menjadi media ajang konflik bagi kelompok atau golongan tertentu. Fenomena ini perlu diwaspadai melalui berbagai kebijakan, sehingga kelembagaan politik dan kemasyarakatan yang ada mampu melaksanakan fungsinya dalam kehidupan politik yang demokratis, dan bukan sebaliknya menjadi media penciptaan kehidupan politik yang anarkis;
- c. Pembangunan yang berlangsung selama ini ternyata belum mampu menciptakan kehidupan ekonomi yang berkeadilan, karena pembangunan ekonomi hanya bertumpu pada upaya mengejar pertumbuhan setinggi-tingginya dan mengabaikan aspek pemerataan. Pendekatan ini telah menciptakan kesenjangan dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran, ketertinggalan dan kemiskinan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Masalah kesenjangan dapat memicu potensi konflik sosial di masyarakat, sehingga perlu diwaspadai dan diantisipasi melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis pemberdayaan ekonomi rakyat;
- d. Heterogenitas masyarakat di berbagai daerah di Indonesia di samping sebagai kekuatan pembangunan juga sangat rentan memicu terjadinya konflik sosial yang bernuansa SARA bila tidak dicermati dan dikelola dengan tepat. Kerusuhan Sambas, Ambon, Sampit, dan Poso merupakan contoh faktual yang menjadi catatan hitam dalam kehidupan nasional yang selama ini dirajut oleh toleransi, kebersamaan, keakraban dan kesetiakawanan



sosial, ternyata terganggu oleh kecemburuan sosial dari kelompok/komunitas masyarakat tertentu terhadap komunitas masyarakat lainnya;

- e. Penegakan supremasi hukum dan keadilan, demokratisasi dan hak asasi manusia (HAM) yang dinilai lambat dalam penerapannya dan cenderung belum secara utuh dirasakan masyarakat, masalah tuntutan pemerintahan yang profesional dan amanah (*Good Governance*), bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat, adalah masalah-masalah yang sangat berpengaruh dan mendesak untuk ditata kembali, sehingga tatanan masyarakat madani yang menjadi prasyarat mewujudkan masyarakat madani tidak sekadar impian;
- f. Tuntutan reformasi yang menginginkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan tatanan kehidupan bermasyarakat ternyata belum didukung oleh kesiapan daerah dalam mempersiapkan berbagai piranti kelembagaan dan peraturan daerah serta kesadaran dan kepatutan masyarakat menyebabkan terjadinya euforia reformasi yang berdampak pada tindakan kekerasan dan anarkis;
- g. Pemilikan beberapa sumberdaya alam dan komoditas perdagangan yang tersedia namun sudah sangat terbatas di negara lain, memiliki nilai komparatif yang perlu dikelola secara arif dan bijaksana agar memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat secara tepat waktu dan optimal serta berkelanjutan.

Dalam skala lokal, dinamika lingkungan strategis sebenarnya sudah terakomodir dalam dinamika lingkungan strategis pada lingkup nasional seperti digambarkan di atas, namun demikian secara spesifik Provinsi Sulawesi Tengah tentunya memiliki variasi lokal yang lebih khusus dan ber beda dengan daerah lainnya pada beberapa aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah di masa mendatang. Aspek dimaksud, meliputi :

- a. Kemauan rakyat Sulawesi Tengah untuk melakukan reformasi total melalui proses transformasi yang mengeliminir gejala dan potensi konflik, hal ini dinilai strategis karena masih kuatnya sifat paternalistik. Di pihak lain, mengindikasikan masih ada pejabat yang enggan bersahabat dengan tuntutan reformasi, sehingga praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme dan penyimpangan yang terselubung masih mengganggu dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. Dampak kerusakan Poso yang dapat menimbulkan dendam yang mendalam dari kelompok masyarakat yang menjadi korbannya, membutuhkan upaya yang serius untuk merajut kembali kehidupan yang aman, tentram, akrab dan bersahabat di daerah melalui peran bersama seluruh komponen masyarakat, dengan jiwa besar dan kesadaran yang tinggi, mengedepankan kepentingan yang lebih besar bagi pembangunan daerah ini, bangsa dan negara dengan tidak mengabaikan nilai-nilai sosial dan budaya etnis lokal;
- c. Posisi geografis Sulawesi Tengah yang terbuka dan dapat diakses dari berbagai alur laut dan darat, merupakan faktor yang dapat menguntungkan di samping merugikan dari segi intervensi kekuatan luar khususnya segi pertahanan keamanan yang perlu diwaspadai. Dalam konteks Pulau Sulawesi, posisi ruang Sulawesi Tengah bisa mendapat penguatan yang menguntungkan di samping kecenderungan eksploitasi yang merugikan dari posisi ruang Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Barat dalam mengakses kawasan strategis lainnya di Pulau Jawa dan Kawasan Timur Indonesia lainnya ataupun dalam konteks Asia Pasifik yang terus berkembang saat ini;
- d. Otonomi daerah dilaksanakan pada saat negara dalam kondisi krisis multi-dimensional, sehingga implementasinya belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal.

Untuk merumuskan rencana strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, adalah tidak cukup jika hanya berdasarkan pada dinamika lingkungan strategis sebagaimana diuraikan di atas, melainkan masih harus

dilakukan serangkaian upaya eksplorasi, identifikasi, dan inventarisasi terhadap berbagai aspek pembangunan dan perkembangan aspirasi masyarakat. Untuk maksud tersebut, maka pendekatan yang ditempuh adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Fokus kajian dengan pendekatan analisis ini dititikberatkan pada: kondisi lingkungan internal yang mencakup faktor kekuatan dan kelemahan; dan kondisi lingkungan eksternal yang mencakup faktor peluang dan tantangan. Secara ringkas, substansi dari hasil analisis SWOT tersebut dirumuskan sebagai berikut :

## **1. Kondisi Lingkungan Internal**

### **Kekuatan :**

- a. Secara geografis Sulawesi Tengah memiliki posisi penting dalam pengembangan jaringan interkoneksi pembangunan kewilayahan di Kawasan Sulawesi, baik dalam lingkup pembangunan ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban;
- b. Karakter masyarakat Sulawesi Tengah yang terbuka, memiliki nilai-nilai budaya lokal dan keagamaan serta modal sosial yang tinggi, merupakan modal dasar pembangunan, khususnya dalam hal mengembangkan kemitraan dalam berbagai bidang pembangunan;
- c. Sulawesi Tengah memiliki potensi SDA yang cukup prospektif dikembangkan untuk usaha-usaha ekonomi produktif, terutama sumberdaya lahan untuk pertanian dan perkebunan, pertambangan, industri, energi, perikanan dan pariwisata;
- d. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan serta semangat keagamaan yang dibarengi oleh kemauan politik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan reformasi kelembagaan sebagai upaya pemantapan implementasi otonomi daerah, merupakan pondasi yang kuat dalam rangka mempertahankan kelangsungan pembangunan.

### **Kelemahan :**

- a. Topografi wilayah Sulawesi Tengah yang sebagian besar terdiri atas kawasan perbukitan dan pegunungan serta kawasan pesisir, menyebabkan aksesibilitas antar kawasan tersebut sangat sulit. Kondisi ini merupakan kelemahan yang perlu ditangani dalam rangka pengembangan interkoneksi antarkawasan dan keseimbangan pembangunan antarwilayah;
- b. Kecenderungan makin menurunnya solidaritas sosial dan merebaknya potensi konflik, meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi, menguatnya diskriminasi hukum dan keadilan serta masih relatif rendahnya kemandirian infrastruktur politik daerah, merupakan titik-titik lemah yang perlu diatasi dalam upaya mempertahankan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Keterbatasan penyediaan energi, belum memadainya pemberian insentif bagi perluasan usaha ekonomi dan penguatan dunia usaha, belum memadainya sarana dan prasarana ekonomi, masih rendahnya upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta belum terciptanya suasana yang kondusif bagi perwujudan rasa aman dan tentram dikalangan masyarakat, merupakan permasalahan yang dihadapi dalam rangka upaya optimalisasi pembangunan;
- d. Mutu SDM yang relatif masih rendah, belum diwujudkannya paradigma baru dalam penyelenggaraan pembangunan dari peran pemerintah sebagai pelaku pembangunan ke peran sebagai fasilitator pembangunan dan masih lemahnya upaya penegakan hukum, merupakan titik lemah yang mengakibatkan belum optimalnya layanan publik.

## **2. Kondisi Lingkungan Eksternal**

### **Peluang :**

- a. Kecenderungan perubahan lingkungan global yang mengarah pada perdagangan bebas, merupakan peluang pasar yang lebih besar dalam pemanfaatan potensi SDA dan komoditas unggulan Sulawesi Tengah;
- b. Globalisasi ekonomi yang ditandai oleh meningkatnya akses informasi pasar, investasi dan teknologi serta menguatnya semangat otonomi daerah, merupakan peluang yang lebih besar bagi pengembangan interkoneksi dalam rangka percepatan pembangunan daerah Sulteng;
- c. Menguatnya arus reformasi dan demokratisasi secara nasional serta tuntutan pelaksanaan Otonomi Daerah, merupakan peluang bagi upaya perbaikan dan pembaharuan di segala bidang pembangunan;
- d. Menguatnya wacana pembangunan berkelanjutan dan perlindungan HAM serta perhatian dunia terhadap kesetaraan dan keadilan jender, merupakan peluang bagi terwujudnya pembangunan yang lebih berkeadilan.

### **Tantangan :**

- a. Konsekuensi logis dari proses globalisasi dan pasar bebas adalah perlunya kesiapan mutu modal manusia yang tinggi, baik pada tataran masyarakat maupun pada sumberdaya aparatur pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan makin ketatnya persaingan antardaerah dan atau antarnegara pada berbagai aktivitas ekonomi, terutama dalam hal: merebut pasar ekspor dan mempertahankan pasar domestik; perluasan lapangan kerja; dan peningkatan layanan publik.

- b. Menguatnya arus reformasi seiring dengan diimplementasikannya Otonomi Daerah secara lebih luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mengelola pembangunan, memungkinkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antardaerah;
- c. Isu pemekaran wilayah seiring dengan diimplementasikannya otonomi daerah, merupakan tantangan yang perlu dicermati secara arif dan bijaksana oleh semua pihak agar tidak berlanjut pada tindakan-tindakan yang bersifat kontraproduktif dan menghambat proses pembangunan di daerah.

Kondisi internal dan eksternal yang dicerminkan oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagaimana diuraikan di atas, adalah merupakan pedoman dasar dalam merumuskan rencana strategi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu lima tahun ke depan.

### **C. Proyeksi pertumbuhan dan PDRB**

Prestasi yang dicapai dalam kurun waktu sebelum-krisis cukup signifikan yang ditunjukkan oleh meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 8 persen per tahun. Kemudian krisis pada pertengahan Tahun 1997 telah banyak mengubah profil perekonomian kita baik secara nasional maupun regional. Hampir pada semua sektor ekonomi di daerah ini mengalami kemunduran yang cukup serius, kecuali beberapa subsektor pada sektor pertanian seperti subsektor perkebunan, subsektor perikanan dan subsektor kehutanan justru memperoleh keuntungan besar. Sektor pertanian sangat dominan dalam mewarnai perekonomian Sulawesi Tengah, yang ternyata, di samping mampu memberi kontribusi yang paling besar dalam pembentukan PDRB, juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja.

Dengan ketangguhan tersebut maka sektor pertanian yang bertumpu pada kekuatan rakyat dan usaha kecil menengah (*small-medium enterprise*) harus diperhitungkan sebagai pendorong utama perekonomian regional Sulawesi Tengah

lima tahun ke depan. Sumbangan riil sektor pertanian dalam pembentukan PDRB pada Tahun 2000 mencapai 47,7 persen dan meningkat menjadi 49,13 persen pada Tahun 2003, yang berarti posisinya dalam struktur perekonomian Sulawesi Tengah semakin strategis.

Dari berbagai indikator perekonomian Sulawesi Tengah yang dikemukakan sebelumnya, dan memperhatikan kecenderungan eksternal maupun domestik yang semakin kondusif, Tahun 2001 perekonomian Sulawesi Tengah telah berada pada titik/fase *development* setelah terjadinya krisis multidimensional yang melanda Bangsa Indonesia. Dari faktor eksternal, ekonomi Sulawesi Tengah akan didukung oleh kondisi perekonomian nasional dan internasional yang dicerminkan oleh meningkatnya permintaan perdagangan ekspor, sementara kondisi sosial keamanan semakin stabil pasca kerusuhan Poso dan bencana gempa bumi di Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan.

Sumber pertumbuhan yang mampu mendorong ekonomi ke depan, sebagian besar berada pada sektor pertanian (sektor primer) khususnya tanaman padi, kakao, kelapa sawit, kelapa dalam, cengkeh, kopi, jambu mete, udang beku, hasil-hasil laut dan lain-lain. Khusus produksi padi/beras Sulawesi Tengah di samping ikut berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah yang mampu swasembada beras, ternyata selama lima tahun terakhir juga selalu mengalami surplus yang cukup besar sehingga mampu berfungsi sebagai penyangga stok beras nasional.

Pengelolaan sumberdaya mineral seperti batu granit, batu split yang potensinya sangat besar akan diupayakan untuk meningkatkan pemasarannya ke luar daerah seperti Kalimantan dan Malaysia, termasuk beberapa lokasi tambang yang masih bersifat eksploratif seperti ladang minyak dan gas alam di Batui Kabupaten Banggai dan nikel di Kabupaten Morowali diperkirakan akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang dapat mendorong perbaikan perekonomian.

Karena itu pada periode 2001-2006, sumbangan sektor primer (pertanian) terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah ditargetkan 2,5 - 3,0 persen, Sektor manufaktur (Sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Sektor Listrik dan Air Bersih, dan Sektor Bangunan) ditargetkan antara 0,9 - 1,5 persen, serta Sektor Pelayanan (Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, Sektor Angkutan dan Komunikasi, Sektor Lembaga Keuangan, dan Sektor Jasa-jasa) diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi dengan target 1,9 - 2,5 persen.

Sejalan dengan pemulihan dan peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, langkah sistematis lintas bidang pembangunan serta upaya khusus untuk mengurangi kemiskinan, jumlah penduduk miskin dalam tahun 2006 diperkirakan akan menurun sekitar 4 - 7 persen dari 28,69 persen pada tahun 1999, dan ketimpangan ekonomi bisa diperkecil.

Proyeksi kerangka ekonomi makro Sulawesi Tengah dalam lima tahun ke depan yaitu 2001-2006 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel : Ringkasan Perkiraan Kerangka Ekonomi Makro Sulawesi Tengah**

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Laju inflasi (%)	8,1	10-15 (18,73)*	7-9 (13,36)*	6-8 (5,84)*	6-8	5-7	5-7
Pertumbuhan ekonomi (%)	4,21	5-6 (5,19)*	5-6 (5,41)*	5,5-6,5 (6,26)*	5,5-6,5	6-7	6,5-7,5
Jumlah penduduk pertengahan tahun	2.066.394	2.107.102	2.148.612	2.190.940	2.233.268	2.276.414	2.320.393
PDRBperkapita (juta Rp)	3,98	4,11 (4,74)*	4,27 (5,24)*	4,45 (5,56)*	4,65	4,88	5,13
Pertumbuhan sektor (%)							
Pertanian	7,2	5,4 (7,43)*	5,5 (6,90)*	6,1 (8,11)*	6,5	6,8	7,0
Penggalian	0,8	3,4 (2,08)*	4,7 (2,24)*	5,0 (2,94)*	6,2	6,5	6,9
Industri pengolahan	2,1	5,2 (3,15)*	6,3 (3,53)*	6,5 (6,32)*	6,9	7,0	7,2
Listrik dan air bersih	4,6	5,3 (3,36)*	5,5 (9,57)*	6,3 (9,55)*	7,5	8,2	8,4
Bangunan	2,4	5,3 (3,36)*	6,3 (4,39)*	6,4 (4,87)*	6,7	7,0	7,4
Perdagangan	2,9	5,1 (4,02)*	6,0 (4,53)*	6,8 (5,51)*	6,8	6,9	7,2
Angkutan dan komunikasi	2,4	5,5 (3,84)*	5,6 (4,44)*	5,8 (4,70)*	5,9	6,0	6,2
Lembaga keuangan	0,9	6,8 (3,96)*	6,2 (4,58)*	7,5 (5,28)*	7,6	7,8	8,0
Jasa	1,4	5,1 (3,12)*	5,5 (4,10)*	6,1 (4,78)*	6,5	7,3	7,5
Struktur ekonomi primer	47,7	47,2 (48,15)*	46,4 (49,03)*	45,3 (49,13)*	44,3	43,4	42,8
Sekunder	17,3	17,6 (17,27)*	18,3 (17,19)*	18,7 (17,06)*	19,8	20,7	21,5
Tersier	35,0	35,2 (34,64)*	35,3 (33,78)*	36,0 (33,81)*	35,9	35,9	35,8

# Proyeksi tahun 2001-2006 berdasarkan tahun dasar 1999

# Data tahun 2000, berdasarkan harga konstant tahun 1993

# (\*) Angka realisasi tahun 2001-2003

## **D. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**

Belajar dari pengalaman pembangunan masa lalu dan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan di daerah ini dalam skala lokal, nasional, regional dan global, secara implisit terkandung berbagai kelemahan, peluang dan tantangan pembangunan sekaligus potensi untuk menjadi kekuatan dan ancaman pembangunan. Seluruh aspek tersebut perlu dicermati dalam memformulasikan masalah pembangunan yang dinilai sangat mendasar dan memiliki perspektif jangka menengah dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

### **1. Bidang Administrasi Umum Pemerintahan**

- a) Belum efektif dan efisiennya kelembagaan pemerintah daerah dalam era otonomi dewasa ini, baik dari aspek struktur maupun fungsi kelembagaan;
- b) Rendahnya citra dan kinerja aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang didasari atas filosofi *good governance*;
- c) Penerapan sistem manajerial pemerintahan belum sepenuhnya profesional dan belum memiliki indikator (ukuran) dan pola yang jelas;
- d) Sistem rekrutmen, penempatan dan promosi jabatan belum sepenuhnya didasari atas prinsip kepatutan dan kelayakan;
- e) Relatif rendahnya mutu modal sumberdaya aparatur pemerintah daerah;
- f) Relatif rendahnya wawasan kewirausahaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah;
- g) Relatif rendahnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum;
- h) Kepastian dan keadilan hukum masih rendah dan belum merata;
- i) Belum optimalnya pemberdayaan nilai-nilai lokal dan Lembaga Hukum Adat;
- j) Legislasi Daerah belum optimal;
- k) Situasi keamanan yang belum sepenuhnya mantap;

- l) Tingginya tingkat heterogenitas dan kesenjangan sosial ekonomi;
- m) Belum sinergis dan optimalnya pelaksanaan fungsi dari setiap komponen struktur politik di daerah dalam era reformasi dan otonomi;
- n) Munculnya kecenderungan perilaku anarkis di kalangan masyarakat;
- o) Belum optimalnya proses transparansi dan komunikasi politik di daerah;
- p) Munculnya kecenderungan interpretasi yang sempit terhadap sifat hubungan kewenangan antarorganisasi pemerintahan dalam era otonomi;
- q) Adanya potensi konflik pada sebagian lapisan masyarakat;
- r) Rendahnya tingkat kesadaran dalam bela negara dan perlindungan masyarakat.

## **2. Bidang Pertanian**

- a) Banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan;
- b) Informasi Pasar yang terbatas tidak dapat memberi rangsangan bagi peningkatan produksi;
- c) Kurangnya pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air;
- d) Belum mantapnya ketahanan pangan dan meningkatkan produksi komoditas komersial unggulan yang berdayasaing tinggi;
- e) Belum adanya pembangunan sistem pertanian berbasis pedesaan yang berdasarkan agribisnis;
- f) Kurang terintegrasinya pembangunan pertanian dengan industri pertanian;
- g) Kurangnya populasi ternak.

## **3. Bidang Perikanan dan Kelautan**

- a) Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya Pantai dan Laut;
- b) Rendahnya pendapatan nelayan dan masyarakat pesisir;
- c) Belum berkembangnya jaringan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;

#### **4. Bidang Pertambangan dan Energi**

- a) Belum tersedianya akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan;
- b) Sangat terbatasnya kapasitas energi listrik;
- c) Belum adanya perencanaan terpadu pemanfaatan dan pengembangan potensi minyak dan gas bumi, khususnya di Kabupaten Banggai;
- d) Terbatasnya pemanfaatan sumberdaya mineral.

#### **5. Bidang Kehutanan dan Perkebunan**

- a). Belum terjaminnya keberadaan hutan dalam luasan yang cukup;
- b). Belum optimalnya pengelolaan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi;
- c). Rendahnya daya saing komoditas perkebunan;
- d). Belum berfungsinya lembaga petani.

#### **6. Bidang Perindustrian dan Perdagangan**

- a) Terbatasnya peluang berusaha dan lemahnya pembinaan bagi pengembangan usaha skala kecil menengah;
- b) Kurangnya peluang masyarakat dalam berwiraswasta;
- c) Kurang optimalnya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
- d) Terbatasnya infrastruktur wilayah guna menunjang pengembangan industri skala besar menengah;
- e) Mutu komoditas ekspor masih relatif rendah;
- f) Rendahnya Pelayanan Operasional Kemetrolagian.

#### **7. Bidang Perkoperasian**

- a) Rendahnya produktivitas tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah;
- b) Belum berkembangnya jiwa kewirausahaan;
- c) Kurang terkelolanya Produk UKMK yang bernilai tambah tinggi;
- d) Rendahnya pemanfaatan teknologi pada UKMK;

- e) Kurangnya promosi dan Jaringan Informasi bisnis serta kemitraan usaha;
- f) Belum berkembangnya Pemasaran dan Jaringan Usaha;
- g) Belum optimalnya Pembinaan Organisasi dan Manajemen Perkoperasian.

## **8. Bidang Penanaman Modal**

- a) Terbatasnya informasi rinci tentang potensi daerah;
- b) Terbatasnya daya saing daerah dalam merebut minat investor untuk menanamkan modal.

## **9. Bidang Ketenagakerjaan**

- a) Kurangnya peluang dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
- b) Relatif rendahnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- c) Kurangnya perhatian pada Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

## **10. Bidang Kesehatan**

- a) Belum meratanya kuantitas, kualitas dan persebaran tenaga kesehatan;
- b) Belum optimalnya manajemen layanan kesehatan dan sistem informasi kesehatan;
- c) Koordinasi lintas program belum berjalan sebagaimana diharapkan;
- d) Belum efektifnya pembinaan dan pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya;
- e) Belum intensifnya pembinaan POSYANDU.

## **11. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**

- a) Terbatasnya daya tampung dan jangkauan layanan pendidikan;
- b) Belum terselenggaranya pola pengelolaan (manajemen) pendidikan dasar dan prasekolah yang berbasis pada sekolah dan masyarakat serta belum berkembangnya jalinan kemitraan secara lintas instansional dalam kerangka optimalisasi layanan pendidikan;
- c) Mutu pendidikan masih rendah;
- d) Penguasaan dan Implementasi IPTEK masih rendah;
- e) Kualitas dan kuantitas guru relatif masih kurang;
- f) Belum optimalnya Pembinaan Pemuda dan Prestasi Olahraga;
- g) Kurangnya perhatian terhadap pengembangan Seni, Budaya dan Pariwisata;
- h) Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

## **12. Bidang Sosial**

- a) Komitmen hidup bermasyarakat dan berbangsa dengan toleransi, kebersamaan dan keakraban yang intim cenderung melemah;
- b) Rendahnya kemandirian masyarakat;
- c) Melemahnya nasionalisme dikalangan masyarakat;
- d) Tingkat kesejahteraan masyarakat relatif masih rendah;
- e) Timpangnya keadilan dan kesetaraan jender;
- f) Rendahnya kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama bagi sebagian masyarakat dan penyelenggara pemerintahan;
- g) Menurunnya kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama;
- h) Belum memadainya sarana pelayanan keagamaan;
- i) Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan.

### **13. Bidang Penataan Ruang**

- a) Belum tersosialisasinya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
- b) Belum tersedianya Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c) Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan lintas wilayah, lintas instansi dan lintas program.

### **14. Bidang Permukiman**

- a) Belum mantapnya pembinaan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- b) Belum optimalnya implementasi Master Plan Drainase dan Pedoman Penataan Bangunan;
- c) Belum tersusunnya studi kelayakan kawasan;
- d) Belum mantapnya Perencanaan Teknis dan Program Bina Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

### **15. Bidang Pekerjaan Umum**

- a) Keterbatasan Prasarana dan Sarana Jalan dan Jembatan;
- b) Belum optimalnya Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;
- c) Perencanaan Umum dan pengendalian program prasarana jalan dan jembatan belum optimal;
- d) Kurangnya Pembinaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan prasarana jalan;
- e) Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun;
- f) Belum optimalnya penerimaan daerah dari sewa alat berat dan laboratorium;
- g) Masih kurangnya pemberdayaan sebagian besar masyarakat petani dalam kelembagaan dan teknis.

## **16. Bidang Perhubungan**

- a) Keterbatasan Prasarana dan Sarana Perhubungan dan Komunikasi;
- b) Pengembangan dan Pengawasan Rambu-Rambu Lalu Lintas relatif kurang mendapat perhatian;
- c) Belum optimalnya Perencanaan dan Penataan Jaringan Trayek Angkutan;
- d) Kurangnya Fasilitas Jembatan Timbang;
- e) Kurangnya Rambu Lalu Lintas;

## **17. Bidang Lingkungan Hidup**

- a) Lemahnya penegakan hukum terhadap oknum aparat dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan;
- b) Masih kurangnya informasi lingkungan hidup dan penyebarannya;
- c) Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) belum efektif;
- d) Pengelolaan sumberdaya alam belum memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan otonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- e) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan;
- f) Pencemaran lingkungan hidup cenderung meningkat;
- g) Meningkatnya luas areal lahan kritis.



### BAB III

## VISI, MISI, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN UMUM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

### A. Visi

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui pembaharuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan semua komponen masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan.

Keterlibatan komponen masyarakat tersebut antara lain ditempuh melalui rapat, seminar, diskusi/dialog yang diikuti oleh unsur masyarakat, para pakar perguruan tinggi dan birokrat yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai Formulasi Baru Rakorbang, dengan nuansa dan semangat baru serta diawali oleh motivasi untuk lebih menyerap aspirasi kabupaten/kota dan masyarakat.

Setelah mengalami proses dan telaahan yang mendalam dari berbagai pihak terkait (*Stakeholders*) dalam seminar-seminar, diskusi, dialog interaktif, maka dalam perspektif jangka panjang diformulasikan visi Sulawesi Tengah yaitu: "Terwujudnya Tataan Masyarakat Madani melalui Otonomi Daerah dalam Format Baru Sulawesi Tengah".

Gambaran tatanan masyarakat madani yang akan diwujudkan di masa depan diartikan sebagai berikut :

1. Tataan masyarakat madani adalah suatu tatanan masyarakat modern yang beradab, mandiri, egaliter, terbuka dan demokratis yang dilandasi oleh moral agama. Berdasarkan gambaran tersebut maka unsur tatanan masyarakat madani yang hendak diwujudkan adalah:
  - a. Masyarakat modern yang beradab adalah masyarakat yang berpikir dan bertindak positif bisa menerima nilai-nilai baru dinamis, inovatif, berpandangan luas dan berorientasi ke masa depan, toleran terhadap perbedaan serta menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;

- b. Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang tidak tergantung namun memahami ketergantungan bukan sebagai kendala, memiliki percaya diri, mempunyai motivasi dan prakarsa yang tinggi, mampu mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki, tekad yang kuat dan tahan terhadap goncangan, adaptif terhadap perubahan serta berpijak pada lingkungan budaya dan sosialnya;
  - c. Masyarakat egaliter adalah masyarakat yang mengakui persamaan hak, menjunjung tinggi nilai HAM, tidak diskriminatif, pengayom, berani mengatakan pendapat yang berpijak pada kebenaran dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi;
  - d. Masyarakat terbuka dan demokratis adalah masyarakat yang menerima perbedaan pendapat, mengutamakan kepentingan masyarakat, tidak otoriter, tidak feodal dan tidak primordial.
2. Format Baru Sulawesi Tengah adalah suatu keadaan dan suasana baru bagi masyarakat Sulawesi Tengah yang akan memasuki kurun waktu yang berkeadilan dan sejahtera di alam budaya politik yang matang dan dewasa seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah.

## **B. Misi**

“Restrukturisasi, Refungsionalisasi, Revitalisasi, Reaktualisasi dan Reposisi Kelembagaan Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan LSM serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebagai Jembatan ke arah pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat madani dalam format baru Sulawesi Tengah”. Pelaksanaan misi tersebut akan dioperasionalisasikan melalui:

1. Penataan kelembagaan pemerintah daerah, yang meliputi :
  - a. Restrukturisasi;
  - b. Refungsionalisasi;
  - c. Revitalisasi;
  - d. Reaktualisasi;
  - e. Reposisi.

Pemberdayaan terhadap Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan LSM dengan jalan meningkatkan keikutsertaan masyarakat melalui organisasi politik, pemerintah, kemasyarakatan dan LSM untuk dapat proaktif mengawasi kerja dan kinerja pemerintah daerah dalam semangat keterbukaan dan demokratisasi.

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui :

- a. Koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, utamanya masyarakat lokal sehingga dapat benar-benar menjadi subjek pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan perangkat aturan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

### C. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Sulawesi Tengah, diperlukan suatu strategi pembangunan dan dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan tahunan selama lima tahun.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan tertentu untuk mempertajam makna dan strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi.

Program merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah suatu yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam merealisasikan program. Kegiatan akan dilaksanakan secara bertahap pertahun selama lima tahun.

Strategi pembangunan Sulawesi Tengah dihasilkan dari analisis lingkungan internal dan eksternal.

Adapun strategi Pembangunan Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan;
2. Penguatan kelembagaan pemerintah daerah;
3. Peningkatan kualitas kehidupan yang demokratis;

4. Pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
5. Pembangunan ekonomi berbasis potensi dan kemandirian lokal;
6. Peningkatan daya saing daerah.

#### **D. Arah Kebijakan Umum**

##### **1. *Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Amanah.***

Untuk mewujudkan pemerintah yang amanah maka Restrukturisasi, Refungsionalisasi, Revitalisasi, Reaktualisasi, Reposisi kelembagaan pemerintah daerah akan dilaksanakan dengan baik dan benar serta berkelanjutan sebagai suatu proses nilai guna dan nilai tambah.

Dengan demikian untuk meningkatkan citra dan kinerjanya di dalam mengemban tugas dan fungsi pokoknya melalui peningkatan kemampuan profesional dan teknis, peningkatan kesejahteraan aparat daerah dan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang bebas dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme. Dengan demikian diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tetap meningkat.

##### **2. *Mengembangkan Struktur Demokrasi***

Pengembangan infrastruktur demokrasi diarahkan pada upaya menciptakan berbagai kebijakan yang berdimensi kesetaraan, keadilan, persamaan dan keterbukaan, serta pemberdayaan struktur politik yang ada, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik maupun masyarakat untuk berperan secara optimal dan profesional di dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, melakukan pendidikan politik dan mendorong partisipasi politik dan budaya politik yang sehat di masyarakat, serta keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

### *3. Memperluas Aktivitas dan Jaringan Ekonomi yang Berbasis Kerakyatan*

Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui perluasan aktivitas dan jaringan perekonomian yang merupakan wujud kontribusi bersama berbagai pelaku ekonomi termasuk usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dan faktor penghambat pengembangan pasar. Penguatan distribusi, pengetahuan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan dan pengembangan kemitraan dalam berusaha, pemberdayaan ekonomi rakyat dan mendorong investasi swasta berdasarkan prinsip pemerataan berkelanjutan dan transparan.

### *4. Meningkatkan Peran Dunia Usaha*

Menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha untuk berkembang, melalui penyediaan infrastruktur wilayah yang memiliki keunggulan sumberdaya alam yang prospektif untuk dikembangkan pemberian berbagai insentif dan kemudahan lainnya, jaminan keamanan dalam proses produksi serta inovasi teknologi untuk menciptakan keunggulan produksi yang mampu bersaing di pasar lokal, nasional, regional dan global. Mengembangkan interkoneksi antara wilayah dan kerjasama dunia usaha sehingga mampu berkembang menjadi profesional, maju dan mandiri.

## **E. Prioritas Pembangunan Daerah**

Mengacu pada hasil pembangunan yang telah dicapai sampai saat ini dan berbagai kekurangan serta keterbatasan yang masih ada, dikaitkan dengan visi pembangunan daerah yang merupakan tujuan pembangunan dan misi sebagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, maka ditetapkan beberapa Program Prioritas dan Program Khusus yang dinilai sangat strategis memberi kontribusi keberhasilan pembangunan dalam rangka memperkuat tatanan yang menjadi landasan untuk mewujudkan masyarakat madani.

Program ini merupakan pengejawantahan dari lima agenda pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kondisi daerah serta mencermati lingkungan strategis yang berpengaruh dalam mempercepat pertumbuhan, keserasian, keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah Sulawesi Tengah.

***Program Prioritas*** dan ***Program Khusus*** dimaksud meliputi :

## **1. Program Prioritas Pembangunan**

### ***a. Reformasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.***

- 1). Restrukturisasi, yaitu menyusun kembali struktur organisasi pemerintah daerah menjadi sebuah organisasi pemerintah daerah otonom yang efektif dan efisien, yaitu ramping dan kaya fungsi;
- 2). Refungsionalisasi, yaitu menyusun kembali tugas dan fungsi pokok masing-masing komponen organisasi pemerintah dan aparat daerah agar terhindar dari kondisi tumpang tindih dan memahami batas lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya;
- 3). Revitalisasi, yaitu memberi penguatan lembaga-lembaga pemerintah dengan sumberdaya manusia yang baik dengan kewenangan yang cukup jelas;
- 4). Reaktualisasi, yaitu menyusun format kerja dan motivasi yang baru sesuai tuntutan zaman dalam alam demokrasi dan otonomi daerah;
- 5). Reposisi, yaitu memposisikan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999, agar dapat tercipta optimalisasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

*b. Peningkatan Layanan Publik.*

Terciptanya suatu pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja sebagai berikut : Indikator yang digunakan dalam pengimpelementasian program ini adalah:

- 1). Hasilnya bermanfaat bagi masyarakat :  
setiap program layanan publik hendaknya jelas; dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- 2). Berlaku adil :  
layanan publik hendaknya dilakukan secara adil atau tidak sewenang-wenang kepada seluruh lapisan masyarakat;
- 3). Berdayaguna dan berhasilguna :  
setiap layanan publik hendaknya dapat mendorong penggunaan sumberdaya secara berdayaguna dan meningkatkan pilihan-pilihan masyarakat;
- 4). Tepat dan sesuai kebutuhan :  
setiap layanan publik hendaknya dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- 5). Transparan :  
setiap layanan publik terutama yang berhubungan dengan kompensasi biaya harus dilakukan secara transparan dengan memberikan informasi selengkapnya kepada masyarakat;
- 6). Akuntabel :  
setiap layanan publik hendaknya terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai dengan

kinerjanya. Mutu layanan dapat diukur melalui komponen utama yaitu :

- a) Keterpercayaan : ketersediaan, kejujuran, konsistensi dan keamanan, serta tepat waktu;
- b) Keterjaminan : pertanggungjawaban, kompetensi dan obyektif;
- c) Penampilan : kesopanan, hasil baik dan keindahan;
- d) Keperhatian : memahami aspirasi masyarakat, ramah, simpatik dan komunikasi yang baik dan benar;
- e) Ketanggapan : cepat tanggap terhadap keperluan pelanggan, cepat memperhatikan dan mengatasi keluhan masyarakat.

7). Proaktif dalam pelayanan publik.

*c. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.*

1. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
2. Efisiensi dan efektivitas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;
3. Keakuratan terhadap kajian potensi pendapatan asli daerah;
4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

*d. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan.*

Terjadinya kerusuhan tindak kekerasan dan segala bentuk anarkis lainnya yang terjadi saat ini serta munculnya interpretasi yang sempit terhadap sifat hubungan kewenangan antara organisasi pemerintah dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 khususnya Pasal 4 Ayat 2 yang mengindikasikan melemahnya rasa integritas bangsa.



Pembinaan persatuan dan kesatuan akan menciptakan integritas bangsa antara seluruh unsur dalam rangka pendayagunaan seluruh modal dasar pembangunan, terutama jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan regional. Untuk itu diperlukan :

1. Integritas daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam wujud :
  - a) Sosialisasi kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota tentang hakikat keberadaan regulasi otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b) Pembuatan regulasi mengenai kewenangan, hak dan kewajiban antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Manajemen konflik, baik yang telah terjadi maupun terhadap potensi konflik, melalui :
  - a) Pembuatan aturan main (*rule of the game*) dalam bentuk dan prosedur penyelesaian konflik;
  - b) Pengembangan organisasi kolektif (kemasyarakatan);
  - c) Arbitrasi.
3. Pendidikan politik bagi masyarakat :
  - a) Seminar politik bagi kalangan masyarakat;
  - b) Pelatihan penguatan demokrasi masyarakat;
  - c) Pengembangan diklat-diklat bagi kaderisasi ormas dan orpol;
  - d) Pengembangan budaya politik yang transparan dan demokratis.

#### *e. Pembangunan Supremasi Hukum dan HAM.*

Pembangunan hukum merupakan salah satu program pembangunan yang memegang peranan sangat penting dalam menunjang pembangunan bidang lainnya. Dalam artian bahwa pembangunan hukum dewasa ini, lebih diarahkan pada pembangunan supremasi hukum dan HAM yang merupakan ujung tombak dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Penyelenggaraannya melalui :

1. Evaluasi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) merupakan produk hukum tertinggi di daerah yang dihasilkan antara pemerintah daerah (Eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota). Penetapan PERDA dimaksudkan untuk mewujudkan supremasi hukum, terutama penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah.

2. Pemberdayaan hukum adat

Kegagalan pembangunan yang terdapat di setiap daerah karena tidak memperhatikan kebiasaan dan norma adat istiadat yang mengikat masyarakat setempat. Adat istiadat tersebut memiliki nilai kearifan lokal yang dijunjung oleh masyarakat sehingga dalam menyusun program pembangunan daerah ke depan perlu dijadikan sebagai rujukan.

Kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pemberdayaan hukum adat di daerah :

- a). Menempatkan hukum adat sebagai aset dalam pembangunan di daerah;
- b). Melalui upaya penelitian, pengkajian, pelestarian hukum adat di daerah sebagai upaya penelitian dan pengkajian terhadap prinsip-prinsip budaya adat daerah.

### 3. Sosialisasi Peraturan Daerah dan peraturan perundangan lainnya

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa produk hukum di tingkat nasional dan daerah telah banyak, namun kurangnya sosialisasi UU dan PERDA mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat. UU dan PERDA merupakan norma yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat sehingga sangat ironis bila masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek dari sebuah UU dan PERDA, justru tidak mengetahuinya.

Kegiatan yang perlu dilakukan sehubungan dengan program ini yaitu :

- a) Melakukan sosialisasi melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi mengenai UU dan PERDA yang telah ada maupun yang baru;
- b) Menjalin kerjasama dengan media massa pusat dan daerah untuk mempublikasikan UU dan PERDA.

### 4. Peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum

Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kembali kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan aparat penyelenggara serta kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi aparat penegak hukum untuk menciptakan budaya hukum yang baik pada semua lapisan masyarakat.

Kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan program ini adalah:

- a) Melakukan pemetaan permasalahan hukum (UU dan PERDA) dalam rangka menerapkan materi, metode dan pendekatan dialogis yang tepat sasaran;
- b) Menggunakan nilai-nilai budaya luhur daerah sebagai salah satu sasaran untuk meningkatkan penyadaran hukum;

- c) Merumuskan pendekatan penyadaran hukum (UU dan PERDA) yang lebih demokratis melalui pendekatan dialogis antara instansi/lembaga pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan yang memfasilitasi penyadaran hukum dengan masyarakat;
  - d) Meningkatkan kesadaran hukum dalam mengaktualisasikan hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara sekaligus dalam rangka membentuk budaya hukum bagi masyarakat dan aparat penyelenggara negara;
  - e) Meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum di berbagai lapisan masyarakat.
5. Peningkatan pemahaman perancangan Peraturan Daerah (legislasi daerah).

Kegiatan yang perlu dilakukan adalah :

- a) Meningkatkan kualitas SDM bagi aparat Pemda dan DPRD melalui kerjasama perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta untuk mendalami ilmu perundang-undangan tersebut;
- b) Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pelatihan kepada aparat Pemda dan DPRD mengenai materi ilmu perundang-undangan.

#### f. *Pengembangan Sumberdaya Manusia*

- 1). Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 2). Peningkatan dan pemerataan pendidikan;
- 3). Perluasan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan dan partisipasi kerja;
- 4). Peningkatan riset, pengembangan IPTEK dan IMTAQ.

*g. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*

- 1). Penyiapan, pemihakan, penguatan dan perlindungan pada usaha ekonomi rakyat yang berorientasi pasar;
- 2). Peningkatan ekspor;
- 3). Pemerataan hasil pembangunan.

*h. Pengelolaan Sumberdaya Alam Berwawasan Lingkungan*

Pengelolaan sumberdaya alam perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program kegiatan sebagai berikut :

- 1). Penyiapan data dasar sumberdaya alam;
- 2). Peningkatan akses informasi sumber daya alam;
- 3). Manajemen sumberdaya alam dan lingkungan hidup berbasis masyarakat;
- 4). Penegakan hukum pengelolaan sumberdaya alam.

*i. Pengembangan iklim investasi dan pembangunan interkoneksi*

- 1). Penciptaan keamanan dan ketertiban;
- 2). Deregulasi dan Debirokratisasi;
- 3). Pemberian insentif dan kemudahan lainnya;
- 4). Pembangunan infrastruktur wilayah;
- 5). Promosi, riset dan pengembangan potensi investasi;
- 6). Kemitraan secara vertikal yaitu kemitraan dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota;
- 7). Kemitraan secara horizontal, yaitu kemitraan dengan Provinsi lainnya;
- 8). Kemitraan secara diagonal, yaitu kemitraan usaha baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

## **2. Program Khusus**

- a) Penyelesaian kerusuhan dan dampaknya di Kabupaten Poso dan daerah lainnya;
- b) Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah korban bencana alam (Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan), akibat bencana alam dan ulah manusia (konflik sosial/kerusuhan);
- c) Pemberdayaan kelembagaan dan aparat pemerintah kabupaten baru.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN**

#### **1. Bidang Administrasi Umum Pemerintahan**

##### **a. Umum**

Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan otonomi, semakin membutuhkan kemampuan setiap aparatur guna mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai kebijakan daerah dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk tercapainya sasaran efisien dan efektif.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada masa lampau masih menghadapi kendala atau hambatan dari sisi perencanaan, pembinaan kemampuan sumberdaya aparatur, pengawasan serta dukungan pembiayaan sehingga belum mencapai tujuan.

Hakikat pembangunan adalah adanya suatu perubahan ke arah tatanan yang lebih baik demikian juga pembangunan di bidang Administrasi Umum Pemerintahan diharapkan akan dapat memberikan manfaat yang lebih baik melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan.

Untuk itu dibutuhkan penataan kembali kelembagaan pemerintah dan sumberdaya aparatur daerah yang lebih profesional sehingga memiliki sensitivitas, responsif, proaktif dan inovatif dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sebagai fasilitator. Mengingat program pengembangan sumberdaya aparatur terdapat pada seluruh dinas, badan, biro, kantor dan

satuan kerja yang terkait dengan penguatan kelembagaan pemerintah daerah, maka program tersebut merupakan prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.

## **b. Arah Kebijakan**

1. Melaksanakan restrukturisasi, refungsionalisasi, revitalisasi, reaktuasialisasi dari reposisi kelembagaan;
2. Meningkatkan layanan publik;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah;
4. Meningkatkan dan mengembangkan sarana aparatur negara;
5. Meningkatkan perencanaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi kebijakan pembangunan;
6. Meningkatkan sistem informasi manajemen kepegawaian;
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah;
8. Mewujudkan aparatur yang produktif, profesional, bersih dan bertanggung jawab;
9. Meningkatkan akuntabilitas publik dan pelayanan prima;
10. Menjalin komunikasi politik dengan infrastruktur politik sebagai mitra pembangunan dalam mengembangkan sistem politik yang demokratis;
11. Mewujudkan kemandirian infrastruktur politik sebagai pilar dalam rangka mewujudkan masyarakat madani, terfasilitasinya infrastruktur politik guna memacu kualitas dan kemandirian infrastruktur sebagai mitra birokrasi, mengayomi dan memotivasi kinerja infrastruktur politik sebagai sarana pembangunan demokrasi yang memiliki kemandirian;
12. Terwujudnya masyarakat yang taat dan sadar hukum;
13. Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan hukum di daerah;
14. Berkembangnya sistem politik yang demokrasi ditopang oleh kemandirian infrastruktur politik;
15. Terfasilitasinya penyelenggaraan pemilu;
16. Makin dewasanya sikap dan perilaku masyarakat yang dilandasi oleh mantapnya pemahaman dan pengamalan demokrasi;



17. Membina dan mengembangkan harmonisasi heterogenitas masyarakat sebagai potensi budaya daerah dan nasional guna menjaga keutuhan NKRI;
18. Mengembangkan dinamika masyarakat ke arah kehidupan yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam membela negara, melindungi masyarakat dan pelayanan kemanusiaan;
19. Mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan keuangan daerah;
20. Meningkatkan kegiatan pengkajian dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dalam segala bidang usaha.

### **c. Program Pembangunan**

1. Program Legislasi, Anggaran dan Pengawasan;
2. Program Pembinaan Wilayah;
3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah;
4. Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur;
5. Program Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
6. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Kerja;
7. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
8. Program Pengembangan dan Peningkatan serta Penataan Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Program Peningkatan Pengawasan Aparatur;
10. Program peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
12. Program Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Informasi dan Komunikasi serta Media Massa;
13. Program Peningkatan Layanan Informasi, Telematika dan Komunikasi;
14. Program Pembinaan Keprotokolanan;

15. Program Penataan Legislasi Daerah;
16. Program Pemberdayaan Lembaga Adat dan Hukum Adat;
17. Program Penanganan Kasus KKN dan Pelanggaran HAM;
18. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum;
19. Program Peningkatan Mekanisme Administrasi Materil;
20. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Kearsipan, Ketatausahaan dan Urusan Umum;
21. Program Pengembangan Jasa Telekomunikasi Daerah;
22. Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Perlindungan Masyarakat;
23. Program Pemeliharaan dan Peningkatan Ketertiban Masyarakat;
24. Program Pembinaan Perlindungan Masyarakat;
25. Program Memasyarakatkan Kearsipan Pemda;
26. Program Pembinaan Sistem Kearsipan;
27. Program Penguatan Lembaga Non Pemerintah Daerah;
28. Program Perbaikan Struktur Politik;
29. Program Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
30. Program Peningkatan Kualitas Proses Politik;
31. Program Peningkatan Riset dan Pengembangan IPTEK.

## **2. Bidang Pertanian**

### **a. Umum**

Sesuai Misi Pembangunan pertanian adalah membangun sistem dan usaha agribisnis melalui pengembangan usaha dan kemitraan, meningkatkan kemampuan SDM pertanian dan organisasi ekonomi petani, mengembangkan inovasi teknologi spesifik lokasi yang ramah lingkungan, mempromosikan dan mengembangkan keragaman sumberdaya alam dan hayati secara optimal dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian juga sebagai upaya untuk memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, modal serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produksi pertanian dan bahan baku industri yang memenuhi kebutuhan pangan.

## **b. Arah Kebijakan**

1. Memantapkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian;
3. Meningkatkan produksi komoditas komersial unggulan yang berdaya saing tinggi;
4. Meningkatkan populasi ternak.

## **c. Program Pembangunan**

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
2. Program Pengembangan Agribisnis

## **3. Bidang Perikanan dan Kelautan**

### **a. Umum**

Pembangunan Perikanan dan kelautan mempunyai harapan mengatasi permasalahan dalam bidang Perikanan dan Kelautan, dan harapan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah yang antara lain : meningkatkan pendapatan masyarakat perikanan (nelayan dan pembudidayaan ikan juga masyarakat pesisir lainnya), penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha serta penerimaan asli daerah. Pemberdayaan masyarakat pesisir selain untuk pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, dituntut juga untuk menjaga kelestarian sumberdayanya.

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan melalui pendekatan pada pengembangan wilayah pesisir dan potensi kelautan dimana ada 3 (tiga) zona pengembangan wilayah seperti : 1). Zona pengembangan Teluk Tomini yang meliputi : Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Banggai; 2). Zona , Pengembangan Teluk Tolo meliputi : Kabupaten Morowali, Kabupaten Bangkep, Kabupaten Banggai; 3). Zona Pengembangan Selat Makassar dan Laut Sulawesi meliputi : Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol.

Pembangunan Perikanan dan Kelautan menjadi keniscayaan manakala kita sadari bahwa sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah merupakan wilayah perairan yang kaya akan sumberdaya kelautan dan perairan, namun disadari pengelolaan bidang ini nampaknya belum dilakukan secara optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dalam bidang kelautan adalah sebagai berikut : i). Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Provinsi; ii). Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Provinsi; iii). Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Provinsi; iv). Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Provinsi; v). Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan Provinsi.

#### **b. Arah kebijakan**

1. Pemberdayaan sosial ekonomi guna meningkatkan pendapatan nelayan dan masyarakat pesisir;
2. Pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
3. Pengendalian persaingan usaha.

#### **c. Program Pembangunan**

1. Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Potensi Kelautan;
2. Program Peningkatan Pembinaan Masyarakat Perikanan dan Kelautan.

#### **4. Bidang Pertambangan dan Energi**

##### **a. Umum**

Pembangunan Bidang Pertambangan dan Energi selama ini telah memberikan kontribusi cukup berarti bagi kemajuan daerah, khususnya dari sub bidang pertambangan. Di Sulawesi Tengah, terdapat potensi pertambangan dan galian yang cukup melimpah antara lain : bahan galian golongan A (strategis) yaitu minyak dan gas bumi, batu bara dan nikel, bahan galian golongan B (Vital) terdiri atas chromit, emas, molibden, dan gambut, bahan galian golongan C terdiri atas marmer, batu gamping, pasir kuarsa, gipsum, granit, lempung, sirtu dan andesit. Disamping itu terdapat pula potensi sumberdaya energi yang cukup besar berupa air dan angin untuk dapat dikelola pada masa depan. Walaupun demikian, potensi yang tersedia, harus diakui belum sepenuhnya di garap secara optimal bagi kemajuan daerah.

##### **b. Arah Kebijakan**

1. Menyediakan informasi yang lengkap tentang potensi pertambangan dan energi untuk kepentingan pengelolaan dan pengusahaan sumberdaya mineral;
2. Meningkatkan efisiensi produksi dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kontribusi penerimaan daerah.

##### **c. Program Pembangunan**

1. Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumberdaya Pertambangan dan Energi;
2. Program Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Energi;
3. Program Pengembangan Energi Kelistrikan.

## **5. Bidang Kehutanan dan Perkebunan**

### **a. Umum**

Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan merupakan salah satu bidang pembangunan yang bertujuan untuk memanfaatkan hutan sebagai sumberdaya alam secara optimal, lestari dan berkesinambungan. Pemanfaatan sumberdaya alam tersebut meliputi sumberdaya alam hayati dan ekosistimnya, sehingga dapat memberikan manfaat berupa perlindungan, produksi dan manfaat lainnya bagi kehidupan manusia. Manfaat perlindungan tersebut adalah perlindungan tata air (hidroologis), perlindungan flora dan fauna serta sebagai penyeimbang siklus kehidupan lainnya. Sumberdaya hutan diharapkan juga mampu memberikan fungsi produksi dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat dan negara. Pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan mencakup semua upaya untuk memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumberdaya hutan dan lahan, sumberdaya hayati, sumberdaya lain dan ekosistemnya bagi kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan. Sumberdaya hutan dan lahan yang ada telah mengalami degradasi karena pemanfaatan yang tidak tepat dan tidak optimal. Olehnya, pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan merupakan upaya memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara seimbang dan berkelanjutan.

### **b. Arah Kebijakan**

1. Menjamin keberadaan hutan dan luasan yang cukup;
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi;
3. Mengembangkan perkebunan rakyat terutama komoditas unggulan.

### **c. Program Pembangunan**

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan;
2. Program Pengembangan Agribisnis.

## **6. Bidang Perindustrian dan Perdagangan.**

### **a. Umum**

Perkembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan selama ini telah menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dilihat dari jumlah perusahaan industri, penyerapan tenaga kerja, investasi, ekspor hasil industri, nilai produksi maupun nilai ekspor hasil industri.

Kegiatan pengadaan dan penyaluran barang selama ini khususnya pada beberapa jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting/strategis lainnya pada umumnya relatif aman dan stabil. Kecuali sejak krisis moneter mulai pertengahan Tahun 1997 dan akibat kerusakan di Poso pada akhir tahun 1998 setidaknya mengganggu kelancaran pengadaan dan penyaluran barang tersebut, namun secara umum, masih dapat dikendalikan. Kegiatan perdagangan antarpulau, secara umum mengalami perkembangan yang cukup berarti, demikian juga terhadap bina usaha dan sarana perdagangan, wajib daftar perusahaan cukup mengalami perkembangan yang baik.

### **b. Arah Kebijakan**

1. Mengembangkan industri yang berbasis sumberdaya alam yang menyerap tenaga kerja cukup tinggi, serta pemberdayaan industri kecil dan menengah;
2. Meningkatkan kompetensi usaha dan jiwa kewirausahaan bagi UKM;
3. Meningkatkan daya saing global dengan dukungan industri;
4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor nonmigas;
5. Mengkreasi dan mengembangkan interkoneksi antar daerah, wilayah, antar dunia usaha;
6. Meningkatkan pelayanan kemetrolagian dan perlindungan konsumen.

### **c. Program Pembangunan**

1. Program Pemberdayaan ekonomi rakyat;
2. Program Pemantapan Struktur Industri;
3. Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi;
4. Program Pengembangan Kemeteorologian.

## **7. Bidang Perkoperasian**

### **a. Umum**

Upaya pembangunan koperasi termasuk PKM yang telah dilakukan selama ini, telah memberikan hasil yang cukup besar terhadap perkembangan dan kemajuan usaha koperasi dan PKM di daerah ini. Hal ini terlihat dari jumlah koperasi, anggota koperasi, asset koperasi, maupun Volume usaha koperasi yang dari tahun ke tahun berkecenderungan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, walaupun kondisi tersebut harus diakui baru dialami oleh sebagian koperasi sementara sebagian lainnya belum dapat berfungsi secara baik sebagai wadah usaha bersama untuk kesejahteraan anggota. Di lain pihak, pembinaan usaha mikro belum tertangani secara memadai sehingga kondisinya masih memprihatinkan tanpa akses perbankan untuk mendukung permodalan mereka.

### **b. Arah Kebijakan**

- Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

### **c. Program Pembangunan**

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
2. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Kewirausahaan PKMK;
3. Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi.



## **8. Bidang Penanaman Modal**

### **a. Umum**

Penanaman modal adalah penggerak pertumbuhan ekonomi. Modal yang tersedia pada masyarakat dan dunia usaha lokal, nasional dan luar negeri perlu dan harus dirangsang untuk diinvestasikan di Sulawesi Tengah. Potensi sumberdaya alam dan pariwisata daerah cukup banyak dan prospektif dikembangkan, sebagian telah memberi manfaat walaupun belum optimal dan sebagian belum dikelola, baik yang berada di bawah permukaan tanah, pesisir pantai dan kelautan. Sumberdaya ini membutuhkan upaya secara terencana sehingga memberi manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat, namun mengalami kendala oleh kemampuan pembiayaan pemerintah yang sangat terbatas. Untuk itu peran dunia usaha dalam menggerakkan aktivitas perekonomian daerah dan berupaya mencari dan menjadi mitra investasi untuk menanamkan modal.

### **b. Arah Kebijakan**

1. Mengembangkan inventarisasi dan publikasi potensi-potensi ekonomi komersial daerah;
2. Menciptakan iklim investasi yang kompetitif;
3. Mengembangkan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan.

### **c. Program Pembangunan**

1. Program Penataan Sistem Pelayanan Perizinan Penanaman Modal;
2. Program Peningkatan Promosi Potensi Investasi Daerah;
3. Program Pengembangan Interkoneksi Penanaman Modal;
4. Program Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal;
5. Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal.

## **9. Bidang Ketenagakerjaan**

### **a. Umum**

Ketenagakerjaan merupakan masalah nasional yang timbul karena tingginya pengangguran yang disebabkan oleh tidak adanya perimbangan antara jumlah tenaga kerja dari tahun ke tahun dengan perkembangan jumlah lapangan usaha yang menampung tenaga kerja, hal ini dapat dilihat dari jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Tengah T.A. 2000 sebesar 1.033.700 jiwa, yang bekerja sebanyak 981.100 jiwa dan 52.700 jiwa atau (5,10%) yang masih mencari pekerjaan. Dilihat dari tingkat pendidikan dan pelatihan pencari kerja tersebut belum memenuhi standar.

### **b. Arah Kebijakan**

1. Memperluas dan menciptakan kesempatan kerja melalui penyiapan tenaga kerja mandiri, peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan kemampuan kewirausahaan;
2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja.

### **c. Program Pembangunan**

1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

## **10. Bidang Kesehatan**

### **a. Umum**

Salah satu indikator kesehatan yang banyak digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan masyarakat suatu wilayah adalah Angka Kematian Bayi (AKB).

Berdasarkan data yang tersedia, AKB di Sulawesi Tengah selama ini telah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Namun demikian, bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia, AKB di Sulawesi Tengah masih menempati urutan ketiga tertinggi.

Penanggulangan masalah kesehatan pada satu sisi dapat dikategorikan sebagai investasi karena dapat mengurangi beban pemerintah dan masyarakat akibat penyakit yang dideritanya, namun pada sisi lain, mobilisasi dana dari masyarakat belum bisa diandalkan mengingat Provinsi Sulawesi Tengah yang termasuk golongan miskin masih cukup besar. Olehnya perlu dibangun dan dikembangkan pola dan sistem pembiayaan kesehatan yang sesuai dimasa depan termasuk penyesuaian tarif dan pada sasaran pelayanan kesehatan.

### **b. Arah Kebijakan**

1. Meningkatkan kapasitas institusi pelayanan kesehatan yang dapat menjamin terciptanya secara bertahap pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui upaya kesehatan dasar dan kesehatan rujukan dengan memberikan prioritas pada keluarga miskin dan korban kerusakan serta gempa;

3. Intensifikasi upaya kesehatan yang berdaya ungkit tinggi terhadap penurunan angka kesakitan dan angka kematian dengan memberikan prioritas pada upaya-upaya preventif dan promotif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif;
4. Memperkuat kemitraan lintas sektor, LSM, Tokoh Masyarakat dan pihak swasta diarahkan untuk pengembangan konsep pembangunan berwawasan kesehatan dan peningkatan perilaku hidup sehat bagi masyarakat pada umumnya.

### **c. Program Pembangunan**

1. Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan;
2. Program Peningkatan Upaya Kesehatan;
3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
4. Program Obat, Makanan dan Bahan berbahaya;
5. Program Peningkatan Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.

## **11. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**

### **a. Umum**

Pembangunan pendidikan adalah upaya untuk mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Era globalisasi dan era otonomi daerah merupakan dua hal yang hendaknya saling memperkuat satu dengan lainnya, dalam pengertian bagaimana menjadikan era otonomi daerah sebagai momentum untuk memacu pendidikan dasar, menengah dan kejuruan agar lebih siap dalam memasuki era globalisasi

Kondisi kepariwisataan yang tersedia dengan potensi sumberdaya alam, budaya serta penduduk yang ramah, kegiatannya difokuskan pada promosi kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom. Potensi kebudayaan dan pariwisata Sulawesi Tengah mempunyai keindahan obyek serta daya tarik wisata yang unik, menarik dan masih asli yang tidak terdapat di daerah lain. Kelemahannya karena belum tersedia rencana untuk peningkatan promosi kebudayaan dan pariwisata, terbatasnya tenaga profesional, kondisi keamanan, infrastruktur yang terbatas, akses kelokasi obyek wisata/budaya belum memadai, adanya keterbatasan sarana/prasarana budaya dan pariwisata kota lintas Kabupaten/Kota.

## **b. Arah Kebijakan**

1. Meningkatkan dan memperluas penyelenggaraan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
2. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, agar dapat mendekatkan lulusan pendidikan dengan dunia kerja dalam kerangka penempatan dan pemanfaatan lulusan secara tepat agar menjadi sumberdaya pembangunan yang produktif;
3. Menciptakan iklim kondusif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan untuk penyelenggaraan pendidikan;
4. Meningkatkan ketahanan budaya dan pariwisata melalui kualitas produk wisata agar makin maju dan mampu menerobos pangsa pasar pariwisata secara global, baik dalam negeri maupun luar negeri. Upaya itu diharapkan dapat dan mampu memulihkan citra kepariwisataan Provinsi Sulawesi Tengah yang bertumpu pada nilai budaya etika, moral dan agama yang berwawasan lingkungan sebagai salah satu sektor andalan untuk menunjang perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
5. Meningkatkan Pembinaan Pemuda dan Prestasi Olahraga;
6. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi nilai-nilai keagamaan di kalangan peserta didik serta mendorong penyediaan guru agama pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

### **c. Program Pembangunan**

1. Program Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah;
2. Program Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan Menengah dan Kejuruan;
3. Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah;
4. Program Peningkatan Pengkajian, Pengembangan Mutu Pendidikan dan Kerjasama;
5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
6. Program Pembinaan dan Penghayatan Nilai-Nilai Keagamaan;
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
8. Program Peningkatan Promosi Pariwisata Daerah;
9. Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian;
10. Program Pembinaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
11. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pendidikan.

## **12. Bidang Sosial**

### **a. Umum**

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi tata kehidupan sosial yang sejahtera yang memungkinkan setiap orang, kelompok atau masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani maupun rohani dengan sebaik-baiknya.

Bertolak dari kenyataan tersebut, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak dan sekaligus mempunyai kewajiban yang sama untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial secara berkeadilan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial diharapkan kepada instansi terkait untuk mendukung setiap pelaksanaannya, agar mampu memberikan arti kepada semua lapisan masyarakat.

## **b. Arah Kebijakan**

1. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap pola penanganan pengungsi, korban bencana alam dan penyandang masalah sosial lainnya;
2. Membangun apresiasi terhadap penduduk usia lanjut, perintis kemerdekaan dan veteran untuk menjaga hakikat dan martabatnya;
3. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
4. Meningkatkan peran kesetaraan gender;
5. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkuat Keimanan dan Ketaqwaan serta memperkuat kerukunan hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **c. Program Pembangunan**

1. Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial;
2. Program Keresasian Publik dalam Penanganan Masalah Sosial;
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
4. Program Peningkatan Peran Masyarakat dalam Kemampuan Kelembagaan dan Pengarus-Utamaan Gender;
5. Program Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama;
6. Program Peningkatan Pelayanan Sarana Keagamaan.

### **13. Bidang Penataan Ruang**

#### **a. Umum**

Kondisi geografi Sulawesi Tengah dengan garis pantai yang sangat panjang, topografi yang pada umumnya curam dan kawasan landai yang terbatas dengan kondisi yang rentan dari bencana alam sehingga penataan ruang harus dilaksanakan. Penataan ruang Provinsi merupakan upaya mengkompromikan kepentingan pembangunan dan kepentingan lingkungan hidup, khususnya konservasi. Oleh karena itu, Penataan Ruang melingkupi kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Permasalahan penataan ruang disebabkan masih rendahnya konsistensi antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang disepakati, dengan kata lain kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang masih belum berperan dengan optimal.

#### **b. Arah Kebijakan**

1. Meningkatkan kualitas rencana tata ruang yang lebih baik dengan didukung oleh data yang lebih akurat dan lebih aktual, baik data kualitatif maupun data kuantitatif;
2. Meningkatkan sosialisasi penataan ruang yang dimulai dari penetapan rencana, pelaksanaan rencana dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga konsep pendekatan penataan ruang dapat lebih demokratis, transparan, dan partisipatif dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mengacu kepada rencana tata ruang yang telah disepakati;
3. Optimalisasi kerjasama dan kemitraan lintas wilayah, lintas instansi dan lintas program.



### **c. Program Pembangunan**

1. Program Penataan Ruang;
2. Program Pembangunan Daerah.

## **14. Bidang Permukiman**

### **a. Umum**

Pembangunan di bidang Permukiman diarahkan untuk membantu agar setiap orang dapat tinggal di rumah yang layak, permukiman yang sehat, aman, harmonis dan terjangkau oleh masyarakat banyak. Pembangunan di bidang Permukiman merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembangunan perumahan dan permukiman. Pembangunan di bidang permukiman dilaksanakan melalui kegiatan penataan bangunan dengan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Tugas dan tanggungjawab serta kewenangan Provinsi adalah penyelenggaraan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jati diri kawasan yaitu menyediakan perangkat lunak melalui penyusunan pedoman.

### **b. Arah Kebijakan**

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah serta keterpaduan lintas instansi;
2. Meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
3. Menyusun perencanaan perumahan dan permukiman.

### **c. Program Pembangunan**

1. Program Pembinaan Pengembangan Kawasan;
2. Program Perencanaan Perumahan dan Permukiman.

## **15. Bidang Pekerjaan Umum**

### **a. Umum**

Pembangunan prasarana jalan merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pembangunan ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan yang titik beratnya untuk meningkatkan layanan arus distribusi barang, orang dan jasa. Sarana dan prasarana jalan yang telah diupayakan selama ini meliputi pembukaan jalan-jalan baru, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang telah dibangun.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki jumlah penduduk yang sebagian besar bermukim di perdesaan dengan pertumbuhan yang relatif cepat, sehingga banyak menimbulkan masalah seperti masalah sampah, drainase, jalan, kebutuhan akan air bersih; sandang, pangan dan lapangan pekerjaan. Menyangkut lapangan pekerjaan bagi masyarakat perdesaan khususnya kaum petani, yang hanya mengandalkan penghasilan dari sawah, harus didukung oleh berfungsinya jaringan irigasi dengan baik dan dapat menjangkau seluruh areal persawahan serta perlu adanya peningkatan sumberdaya manusia, yang sejalan dengan kemajuan di bidang teknologi pertanian.

Dari semua bentuk kegiatan di atas, kebijaksanaan yang diambil harus mengacu kepada pendekatan wilayah, serta peningkatan peran serta masyarakat mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan pembangunan, sehingga dapat mendorong timbulnya rasa memiliki yang kuat dari masyarakat terhadap aset maupun hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

## **b. Arah Kebijakan**

1. Membangun prasarana jalan dan jembatan antarwilayah ibu kota Provinsi, ibu kota kabupaten dan daerah kantong produksi;
2. Melakukan pemeliharaan dan pembangunan jalan untuk mempertahankan fungsi jalan, umur rencana dan daya dukung jalan serta menghubungkan daerah-daerah terisolir dan kantong-kantong produksi;
3. Mengfungsikan secara optimal jaringan irigasi yang telah ada dan mendayagunakan organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam rangka Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi (PKPI) maupun pengelolaan sumberdaya air secara umum;
4. Memantapkan perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
5. Mensinergikan program lintas sektoral pada pembangunan jalan dan jembatan;
6. Memantapkan Administrasi dan Sistem Pelaporan Pelaksanaan Prasarana Jalan;
7. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui Sewa Alat Berat dan Laboratorium.

## **c. Program Pembangunan**

1. Program Pembangunan Jalan;
2. Program Pemeliharaan dan peningkatan Jalan dan Jembatan;
3. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
4. Program Pengencalan Banjir dan Pengamanan Pantai;
5. Program Pengelolaan Pelayanan Peralatan Berat, Kendaraan dan uji coba Laboratorium;
6. Program Peningkatan Pengawasan Konstruksi;
7. Program Pembinaan Administrasi Prasarana Jalan dan Jembatan.

## **16. Bidang Perhubungan**

### **a. Umum**

Pelayanan perhubungan saat ini diarahkan kepada penanggulangan krisis ekonomi melalui penyediaan jasa perhubungan dengan menjaga kinerja prasarana dan sarana yang ada, menjaga kelancaran angkutan dan distribusi bahan pokok serta membantu program kegiatan yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Bidang perhubungan darat, laut dan udara dalam upaya peningkatan pelayanan mempunyai tugas menyiapkan konsep pembinaan, koordinasi dan melakukan evaluasi serta mengatasi masalah dalam penyelenggaraan tugas di bidang perhubungan yang meliputi angkutan orang, barang, pengendalian operasional angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta udara. Disadari bahwa perhubungan dan komunikasi merupakan sarana penunjang peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi, sehingga ketersediaan dan jangkauan pelayanan keseluruhan wilayah terutama ke kantong-kantong produksi merupakan prasyarat mutlak.

### **b. Arah Kebijakan**

Transportasi darat, laut dan udara diarahkan pada pentarifan dan keselamatan serta komunikasi.

#### **- *Pentarifan***

Pungutan kepada pengguna prasarana dan sarana transportasi darat, laut dan udara dilakukan secara proporsional sesuai manfaat dan dampak yang ditimbulkan, sehingga mampu menunjang peningkatan kualitas pelayanan angkutan transportasi darat, laut dan udara.

#### **- *Keselamatan***

Menurunkan tingkat kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jasa angkutan transportasi darat, laut dan udara yang diwujudkan dengan melegalisasi dan sosialisasi aturan-aturan/standar teknis prasarana dan sarana transportasi darat, laut dan udara, peningkatan operasional pelayanan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- *Komunikasi*

Melengkapi Prasarana dan Sarana Perhubungan serta Komunikasi.

**c. Program Pembangunan**

1. Program Pengembangan Fasilitas Transportasi Darat;
2. Program Pengembangan Fasilitas Transportasi Laut;
3. Program Pengembangan Fasilitas Transportasi Udara;
4. Program Peningkatan Pelayanan Pos dan Telekomunikasi.

**17. Bidang Lingkungan Hidup**

**a. Umum**

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sumberdaya alam yang relatif banyak dan kaya tata nilai lokal. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan penuh kearifan melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis kerakyatan untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Untuk itu, kebijakan pembangunan harus ditujukan kepada upaya mengoptimalkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga dayadukung dan kelestariannya guna memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada rakyat banyak dari generasi kegenerasi. Seiring dengan tuntutan reformasi yang terus bergulir di masyarakat pembangunan daerah harus menggambarkan perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dalam Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas : Pengendalian lingkungan hidup lintas kabupaten/kota, Peraturan tentang pengamanan dan pelestarian sumberdaya air lintas kabupaten/kota, Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil, Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan potensial tetapi berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu kabupaten/kota, pengawasan

pelaksanaan konservasi lintas kabupaten/kota, Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional.

## **b. Arah Kebijakan**

1. Memelihara semua aspek daya dukung lingkungan hidup terhadap seluruh aktivitas pengelolaan SDA agar memberikan kemanfaatan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, serta memperhatikan kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mendayagunakan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal;
4. Menyiapkan perangkat hukum termasuk Perda yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
5. Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## **c. Program Pembangunan**

1. Program Pembinaan Daerah Pantai;
2. Program Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Program Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air;
4. Program Rehabilitasi Lahan Kritis;
5. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
6. Program Inventarisasi dan Evaluasi Sumberdaya Darat.

## **BAB V**

### **PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA**

Salah satu ciri dari suatu pemerintahan yang amanah adalah dilaksanakannya azas akuntabilitas, dalam artian bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan layanan terhadap masyarakat harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Adapun pengertian kinerja yang dimaksud adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang telah ditetapkan.

Untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan pemerintah dilakukan melalui tahapan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Sedangkan tahapan evaluasi kinerja dilakukan dengan cara menghitung capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang telah ditetapkan.

#### **A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA**

##### **1. *Penetapan Indikator Kinerja***

Penetapan indikator kinerja dimulai dari proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data dan informasi untuk selanjutnya menjadi dasar di dalam menentukan kinerja/program/kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Adapun penjelasan kelompok-kelompok dalam penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

- .. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, informasi, kebijakan, peraturan perundang-undangan dan sebagainya;
- .. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik;
- .. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah;
- .. Indikator manfaat (*benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;
- .. Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap kegiatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

## **2. Penetapan Capaian Kinerja**

Penetapan capaian kinerja adalah untuk mengetahui dan menilai pencapaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator-indikator kinerja tidak terlepas dari proses kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran, atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk mengukur kinerja, digunakan format pengukuran kinerja (formulir PK) sebagaimana yang tercantum dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :



## B. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kebijakan berdasarkan nilai capaian kinerja kegiatan tersebut.

Sebagai panduan di dalam melaksanakan evaluasi, digunakan acuan formulir evaluasi kinerja kegiatan (Formulir EK-1), formulir evaluasi kinerja program (Formulir EK-2), formulir evaluasi kinerja kebijakan (Formulir EK-3), yang tercantum dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

### 1. Evaluasi Kinerja Kegiatan (EK-1)

No.	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja	Bobot Kelompok Indikator Kinerja	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Inputs			
			Outputs			
			Outcomes			
			Benefits			
			Impacts			
			Jumlah nilai capaian kegiatan 1		100,00	
			Inputs			
			Outputs			
			Outcomes			
			Benefits			
			Impacts			
			Jumlah nilai capaian kegiatan 2		100,00	

Untuk mendapatkan nilai capaian kelompok indikator kinerja, digunakan rumus :

Nilai Capaian Kelompok : Indikator Kerja	$\frac{\text{Capaian Kelompok Indikator Kinerja} \times \text{Indikator Kinerja}}{100 \%}$
---	--

## 2. Evaluasi Kinerja Kegiatan (EK-2)

No.	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja	Bobot Kelompok Indikator Kinerja	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Jumlah nilai capaian program 1			
			Jumlah nilai capaian program 1			

Nilai Akhir Capaian Kegiatan	$\frac{\text{Nilai Capaian Kegiatan} \times \text{Bobot Kegiatan}}{100 \%}$
------------------------------	---

### 3. Pengukuran Evaluasi Kinerja Kegiatan (EK-3)

No.	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja	Bobot Kelompok Indikator Kinerja	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah Nilai capaian Untuk Kebijakan 1					

Untuk mendapatkan nilai capaian akhir kegiatan, digunakan rumus :

Nilai Capaian Akhir Program	$= \frac{\text{Nilai Capaian Program} \times \text{Bobot Kegiatan}}{100 \%}$
--------------------------------	--

### C. KESIMPULAN HASIL EVALUASI KINERJA

Dari keseluruhan rangkaian penilaian hasil indikator kinerja, maka kesimpulan tingkat keberhasilan dari evaluasi sapat diukur berdasarkan skala pengukuran kinerja dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

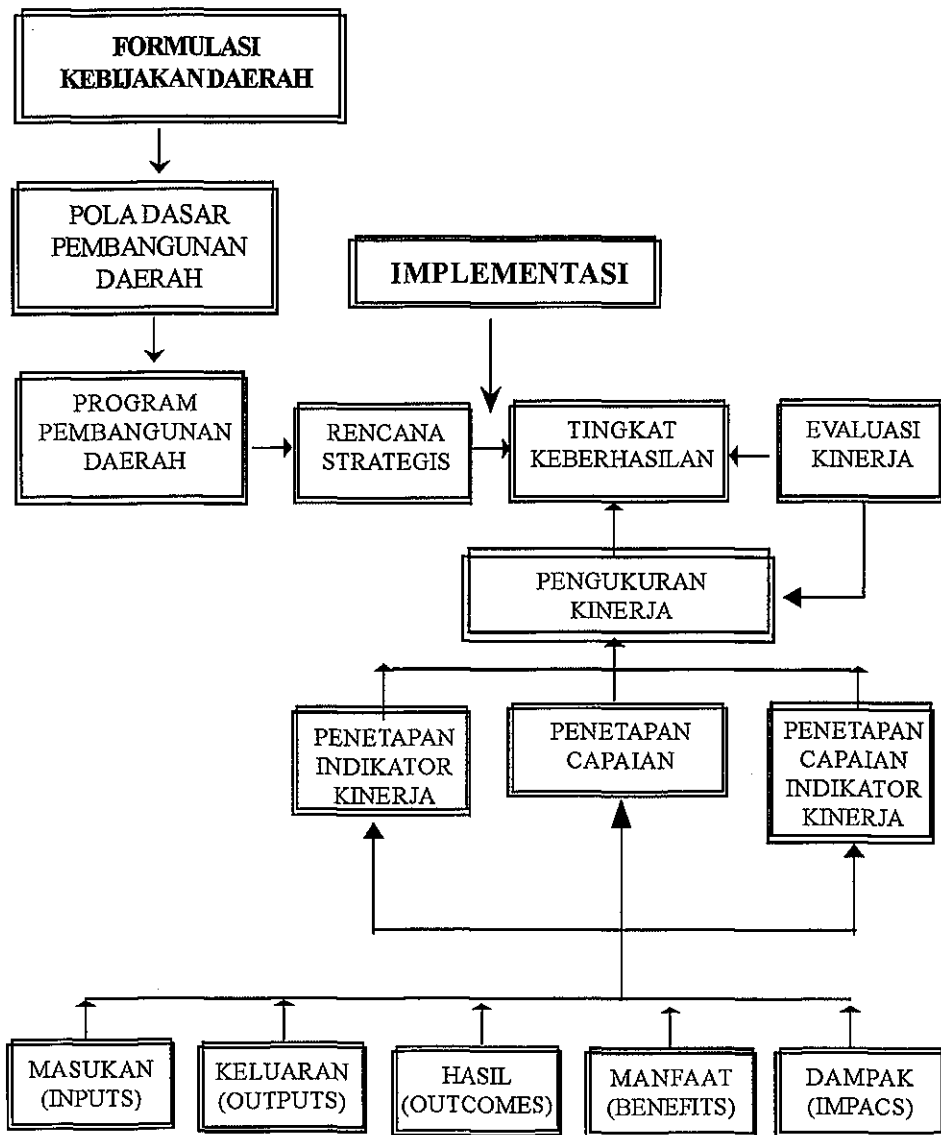
No.	Range	Penilaian
	$\geq 85$	Sangat Baik/Sangat Berhasil
	70 S/D 84,99	Baik/Berhasil
	55 S/D 69,99	Sedang/Cukup Berhasil
	$< 55$	Kurang Baik/Kurang Berhasil

#### **D. ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada hakekatnya, uraian tentang analisis pencapaian akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tentang besaran nilai tingkat pencapaian evaluasi kinerja berdasarkan indikator, kinerja yang ada (Indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), akan tetapi lebih merupakan suatu analisis pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, yang berisi tentang :

- Uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Penjelasan tentang proses pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- Analisis terhadap komponen - komponen penting dari tiap indikator penilaian kinerja (indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), analisis keuangan dan analisis kebijakan dengan cara melakukan perbandingan antara indikator kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan atau antara kinerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya.

## BAGAN ALUR PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA



## BAB VI

### MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 2001-2006

#### A. BIDANG ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET						JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006		
1.	Program Legislasi, Anggaran dan Pengawasan - Legislasi, anggaran dan pengawasan	1	1	1	1	1	1	6 paket	DPRS
2.	Program Pembinaan Wilayah - Pembinaan wilayah	1	1	1	1	1	1	6 paket	GUBWAGUB
3.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah - Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah; - Analisa jabatan dan formasi jabatan; - Evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah; - Reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah; - Peningkatan sistem Administrasi dan manajemen kepegawaian.	38	38	38	38	38	38	38 paket 6 kali 6 kali 6 paket 6 paket	SELURUH INSTANSI BKD
4.	Program pengembangan Sumberdaya Aparatur - Pendidikan formal lanjutan S1, S2 dan S3; - Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional; - Ujian Dinas Provinsi, Kabupaten dan Kota; - Seleksi calon praja STPDN; - Rapat Baperjakat,	38 38 1 1 4	38 38 1 1 4	38 38 1 1 4	38 38 1 1 4	38 38 1 1 4	38 38 1 1 4	38 paket 38 paket 6 kali 6 kali 24 kali	SELURUH INSTANSI SELURUH INSTANSI BKD

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET						JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006		
5.	- Pemutakhiran data pejabat eselon II, III dan IV;	1	1	1	1	1	1	6 kali	BKD
	- Administrasi kenaikan pangkat, pensiun dan mutasi PNS;	2	2	2	2	2	2	12 kali	
	- Sosialisasi peraturan kepegawaian.	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	Program Penyusunan Standar Pelayanan Publik	1	1	1	1	1	1	6 kali	
6.	- Peningkatan penilaian dan evaluasi pelayanan publik;	1	1	1	1	1	1	6 kali	Seluruh Instansi
	- Peningkatan sistem penilaian kinerja aparatur;	1	1	1	1	1	1	6 kali	
	- Forkompada.	1	1	1	1	1	1	6 kali	
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Kerja	38	38	38	38	38	38	38 paket	
7.	- Peningkatan prasarana dan sarana kerja								BIRO EKBANG
	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Daerah								
	- Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD;	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD;	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD;	1	1	1	1	1	1	6 paket	BAPPEDA
	- Pembinaan sistem administrasi pembangunan daerah kabupaten dan kota;								
	- Penyediaan informasi data pembangunan APBD;	-	-	-	-	-	-	3 paket	
	- Koordinasi pengendalian program pembangunan daerah;	-	-	-	-	-	-	2 paket	
	- Pemantauan program pembangunan daerah;	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Evaluasi tahunan pelaksanaan program pembangunan daerah;	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Evaluasi rencana strategis program pembangunan daerah;	1	1	1	1	1	1	6 paket	
		-	-	-	-	-	-	2 paket	

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET						Jumlah 2001-2006	INSTANSI	
		2001	2002	2003	2004	2005	2006			
8.	- Koordinasi perencanaan pembangunan daerah;	8	8	8	8	8	8	48 keg	Seluruh Instansi	
	- Dukungan dana tim asistensi pemda;	-	1	1	1	1	1	5 paket		
	- Penyusunan dokumen dan instrumen pembangunan daerah;	1	1	1	1	2	1	7 paket		
	- Capaian Visi dan Misi pemerintah daerah;	-	-	-	-	1	1	2 paket		
	- Penyusunan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);	38	38	38	38	38	38	38 paket		
	- Koordinasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).	38	38	38	38	38	38	38 paket		
	<i>Program Pengembangan dan Peningkatan serta Penataan Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah</i>									BIRO KEUANGAN
	- Penyertaan modal PT. Bank Sulteng;	-	1	1	1	1	1	5 paket		
	- Pembinaan bendaharawan;	-	-	1	1	1	1	4 paket		
	- Pembinaan dan peningkatan kinerja dan keuangan daerah;	-	-	1	1	1	1	4 paket		
	- Peningkatan perencanaan dan penyusunan kapasitas keuangan daerah;	-	-	1	1	1	1	4 paket		
	- Penataan keuangan, pembinaan dan pengendalian BPJP;	1	1	1	1	1	1	6 paket		
	- Pembinaan dan Peningkatan Sistem Akuntansi Perhitungan Anggaran Daerah;	-	-	-	1	1	1	3 paket		
	- Pengembangan sarana dan pengelolaan administrasi keuangan daerah;	1	1	1	1	1	1	6 paket		
	- Konsultasi dana perimbangan keuangan daerah;	1	1	1	1	1	1	6 paket		
	- Peningkatan penyusunan dan penyajian data anggaran daerah;	1	1	1	1	1	1	6 paket		
	- Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah;	-	-	1	1	1	1	4 paket	KKD	



No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET						JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006		
9.	- Pemeriksaan komprehensif dana desentralisasi;	4	4	4	4	4	4	24kali	BAWASDA
	- Pemeriksaan dana dekonstruksi;	4	4	4	4	4	4	24kali	
	- Sosialisasi kebijakan pengawasan.	-	1	-	-	1	1	3 kali	
9.	Program Peningkatan Pengawasan Aparatur								BAWASDA
	- Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan;	2	2	2	2	2	2	12 kali	
	- Rapat koordinasi pengawasan;	2	2	2	2	2	2	12 kali	
	- Monitoring pelaksanaan proyek/kegiatan.	2	2	2	2	2	2	12 kali	
10.	Program Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah								DISPENDA
	- Pengkajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh P3;	-	-	1	-	1	1	3 kali	
	- Pemutakhiran data dan pemetaan potensi pajak daerah/tunggakan pajak daerah serta retribusi daerah/tunggakan retribusi daerah;	1	1	1	1	1	1	6 kali	
	- Pelayanan langsung ke konsentrasi atau subjek pajak dengan SAMSAT keliling;	1	1	1	1	1	1	6 kali	
	- Sosialisasi PERDA pendapatan daerah;	1	1	1	1	1	1	6 kali	
	- Koordinasi, monitoring retribusi daerah dan dana bagi hasil pendapatan;	1	1	1	1	1	1	6 kali	
	- Penyusunan target pendapatan;	1	1	1	1	1	1	6 kali	
	- Pemantauan dan evaluasi PAD;	1	1	1	1	1	1	6 kali	
	- Koordinasi pendapatan antara provinsi dengan kabupaten dan kota;	1	1	1	1	1	1	6 kali	
	- BinteK pengelolaan PAD.	1	1	1	1	1	1	6 kali	
11.	Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								
	- Laporan pertanggung jawaban kepala daerah;	1	1	1	1	1	1	6 paket	

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET						JUMLAH	INSTANSI	
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2001-2006		
	- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan									
	1. Monev kinerja pemerintah daerah daerah kabupaten dan kota;	1	1	1	1	1	1	6 paket	BIRO PEMERINTAHAN	
	2. Inventarisasi Permasalahan kewenangan daerah;	-	-	1	-	-	-	1 paket		
	3. Penataan kewenangan daerah;	-	-	1	-	1	-	2 paket		
	4. Pemantapan implementasi kewenangan daerah.	-	-	-	1	1	1	3 paket		
	- Pengkajian efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah penegasan batas daerah :	1	1	1	-	-	1	4 paket		
	1. Penyelesaian sengketa batas Sulteng-Gorontalo;	-	-	1	-	-	-	1 paket		
	2. Penyesuaian nomenklatur batas Sulteng-Gorontalo di peta dan lapangan;	-	-	1	-	-	-	1 paket		
	3. Sosialisasi penegasan batas Sulteng-Gorontalo;	-	-	-	-	1	-	1 paket		
	4. Penyelesaian sengketa batas Sulteng-Sulsel;	-	1	1	1	-	-	3 paket		
	5. Pembatasan batas Kab. Donggala dengan Kab. Mamuju Utara;	-	1	-	-	1	-	2 paket		
	6. Penegasan batas dan pemasangan patok batas Sulteng-Sultra;	-	-	-	-	1	-	1 paket		
7. Perapatian patok Sulteng-Sulsel;	-	-	-	-	1	-	1 paket			
12.	8. Fasilitas penegasan batas antar kabupaten dan kota.	-	-	-	1	1	1	3 paket	BIRO INFOKOM	
	- Konversi P4B, monitoring dan evaluasi SAK di kecamatan	-	-	-	1	1	1	3 paket		
	- Pembinaan Badan Perwakilan Desa (BPD)	-	-	-	1	1	1	3 paket		
	- Dukungan pemantapan pelaksanaan OTDA dan sukses Pemilu 2004	-	-	-	1	-	-	1 paket		
	- Rapat kerja gubernur dengan bupati dan walikota	1	1	1	1	1	1	6 paket		
	Program Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Informasi dan Komunikasi serta Media Massa									
	- Peningkatan fungsi infokom sebagai fasilitator pemda dengan sistem terpadu;	1	1	1	1	1	1	6 paket		
	- Pembuatan paket film dokumentasi;	1	1	1	1	1	1	6 paket		

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET						JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006		
13.	- Peningkatan hubungan kerja antara pemerintahan, media cetak, Elektronik dan lembaga pers;	1	1	1	1	1	1	6 paket	SEKRETARIAT DPRD  BAPPEDA   BIRO INFOKOM   BIRO INFOKOM
	- Pendataan dan sosialisasi;	-	-	1	1	1	1	4 paket	
	- Pembuatan buku, jurnal, sambutan dan klipng;	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Dukungan pembinaan wartawan;	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Pemberdayaan masyarakat sadar informasi;	-	-	1	1	1	1	4 paket	
	- Peningkatan kemampuan teknis Profesional Infokom;	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Evaluasi dan pengkajian data;	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Pengadaan material Infokom.	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	Program Peningkatan Layanan Informasi Telematika dan Komunikasi								
	- Publikasi dan informasi mendukung kegiatan dewan;	-	-	1	1	1	1	4 paket	
	- Sosialisasi produk dewan dan tata tertib dewan;	-	-	1	1	1	1	4 paket	
	- Peningkatan pembangunan dan pengembangan telematika;	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Peningkatan dan pengembangan layanan publik data;	-	1	1	1	1	1	5 paket	
14.	- penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan;	1	1	1	1	1	1	6 paket	BIRO INFOKOM   BIRO INFOKOM   BIRO INFOKOM
	- Penyempurnaan dan pengembangan statistik daerah;	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Penukutan wawasan nusantara dan ketahanan bela negara;	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Pemberdayaan masyarakat sadar infokom;	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Pemberdayaan Juru Informasi.	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	Program Pembinaan Keptokolan								
	- Pengadaan fasilitas keptokolan;	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Mengevaluasi kegiatan keptokolan;	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- keptokolan.	-	1	1	1	1	1	5 paket	

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET					JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
15.	Program Penataan Legesiasi Daerah - Inventarisasi & pengkajian peraturan daerah; - Penyusunan dan pembahasan RAPERDA dan penerbitan lembaran daerah; - Sosialisasi rancangan peraturan daerah.	13	4	4	3	3	3	BIRO HUKUM
		10	5	5	5	5	5	30 perda
		10	6	5	5	5	5	35 perda
								36 perda
16.	Program Pemberdayaan Lembaga Adat dan Hukum Adat - Pendataan hukum adat; - Pembinaan lembaga adat; - Pemberdayaan lembaga adat; - Pembukuan hukum adat.	-	2	2	2	2	2	10 lokasi
		-	4	4	4	4	4	20 lemb.
		-	1	1	4	4	4	14 lemb.
		-	2	2	2	2	2	10 judul
17.	Program Penanganan Kasus KKN dan Pelanggaran HAM - Penyelenggaraan koordinasi dengan bawasda; - Penyelenggaraan koordinasi terhadap PPNS; - Analisis pelanggaran HAM; - Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penurunan pelanggaran hukum dan kriminalitas; - Penanganan kasus gugatan terhadap pemda.	4	5	5	5	5	5	29 Kali
		5	6	6	8	6	6	37 Kali
		1	2	2	2	1	1	9 Kali
		1	1	1	1	1	1	6 Kali
		-	-	-	1	1	1	3 kasus
18.	Program peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum - Penyuluhan hukum; - Peningkatan kesadaran hukum melalui buletin leaflet/ brosur; - peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dengan pembelian buku pendukung- undangan; - Pembinaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ( SJDIH).	25	30	30	30	30	30	175 Kali
		11	24	24	24	24	24	131 Kali
		250	260	285	280	350	450	1915 Eksp.
		5	7	8	9	10	10	49 Kali

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET					JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005		
19.	Program Peningkatan Mekanisme Administrasi Materi - Peningkatan mekanisme administrasi materi dan pengelolaan aset daerah	1	1	1	1	1	6 Paket	PERLUM
20.	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Kearsipan, ketatausahaan dan Urusan Umum - Peningkatan sistem pengelolaan kearsipan, ketatausahaan, dan urusan umum selda Prov. Sulteng	1	1	1	1	1	6 paket	PERLUM
21.	Program Pengembangan Jasa Telekomunikasi Daerah - Pengembangan jasa telekomunikasi daerah provinsi Sulteng	1	1	1	1	1	6 paket	
22.	Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Perlindungan Masyarakat - Investigasi dan pengkajian DRB Sulawesi Tengah; - Peningkatan ketatalaksanaan Linmas Sulteng; - Rakorda PBP Sulawesi Tengah; - Forum Dialog.	1 1 1 -	1 1 1 -	2 1 1 1	2 1 1 1	1 1 1 2	9 paket 6 paket 6 paket 6 paket	BADAN LINMAS
23.	Program Pemeliharaan dan Peningkatan Keterbacaan Masyarakat - Pembinaan manajemen PBP di daerah; - Pembinaan Salkorlat PBP di daerah; - Pengadaan/ penyajian RUPUS KORDALOPS PBP Sulteng; - Rakor Salkorlat PBP dengan LSM dan instansi terkait; - Penegakan Perda; - Pembinaan Tranlitum Kerjasama Pold.	1 1 1 1 1 -	1 1 1 1 1 -	1 1 1 1 1 -	1 1 1 1 1 -	1 1 1 12 12 1	6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 60 paket 2 paket	BADAN LINMAS      POL. PP

# B. BIDANG PERTANIAN

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET					JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Pembinaan sistem ketahanan pangan; - Pengembangan makanan alternatif melalui pemanfaatan sumber pangan lokal dan non lokal; - Pengembangan sistem dan distribusi dan sarana dan bahan pangan; - Pengembangan gerakan pengankaragaman konsumsi pangan; - Pembinaan gerakan partisipasi masyarakat dalam peningkatan sadar pangan dan gizi; - penyusunan peta kerawanan pangan (Food Insecurity Atlas); - Pembinaan dan pengawasan dana penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP); - Peningkatan operasional tim pangan dan gizi.	653.944	685.299	705.865	726.049	748.869	774.705	DISTANBUNAK
		-	32	58	60	72	72	72 Kec.
		-	1	1	1	1	1	5 paket
		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	30 %
		-	-	100	150	200	200	650 Klp.
		-	-	-	1	1	1	3 paket
		-	-	-	4	4	4	12 paket (Kab.)
		-	-	1	1	1	1	4 paket
2.	Program Pengembangan Agribisnis - Peningkatan produk hortikultura; - Peningkatan produk peternakan; - Pengawasan dan sertifikasi benih; - Pengembangan teknologi pertanian dalam upaya pemasaran dalam dan luar negeri; - Pembinaan dan pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian; - Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian; - Peningkatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); - Peningkatan pelayanan kesehatan hewan/ternak.	169.168	175.005	180.146	185.439	190.888	196.746	DISTANBUNAK
		11.107.800	12.613.000	14.560.600	17.582.000	20.308.500	24.543.200	100.885.100 ton
		50	50	50	50	50	50	300 unit
		1	1	1	1	1	1	6 %
		1	1	1	1	1	1	6 paket
		1	1	1	1	1	1	6 paket
		-	2	2	2	2	2	10 paket
		-	-	-	1	1	1	3 paket

### C. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET						JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006		
1.	Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Potensi Kelautan	80.000	85.000	90.000	92.000	95.000	100.000	542.000 ton	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	- Eksplorasi dan pengelolaan kekayaan laut;	450	500	550	585	600	620	3.305 ton	
	- Eksplorasi dan konservasi pengelolaan;	5	10	15	15	20	25	90 SIUP	
	- Pemberitaan izin usaha perikanan;	1	2	2	2	2	2	11 perda	
	- Penyusunan RAPERA perikanan dan kelautan;								
	- Penyusunan rencana dan evaluasi program perikanan dan kelautan;	1	2	2	2	2	2	11 Lap.	
	- Pengembangan balai benih;	2	2	2	2	2	2	12 unit	
	- Pemberdayaan unit perbenihan rakyat (UPR) dan pembudidayaan ikan;								
	- Pemberdayaan nelayan dan pengolahan ikan;	5	10	12	14	16	18	75 orang	
	- Peningkatan sarana dan prasarana perikanan yang berorientasi pasar dalam dan luar negeri/PPI TPI;	20	20	40	150	200	240	670 orang	
	- Workshop pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan;	1	2	2	2	3	3	13 unit	
	- Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP) Teluk Tomini;	-	4	4	4	4	4	20 kali	
	- Promosi dan ekspansi hasil perikanan dan kelautan	-	-	-	1	1	1	3 paket	
	- Pembenihan ikan;	1	1	2	2	2	2	10 paket	
	- Pembibitan benur;	200	250	300	800	900	1.000	3.450 Rb.ekor	
	- Pelayanan sertifikasi mutu;	750	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	15.750 Rb. ekor	
	- Pengendalian/pengawasan izin usaha perikanan;	45	55	60	65	70	80	375 Sertif.	
	- Pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan.	30	40	45	50	55	60	280 SIUP	
		3	6	8	10	12	14	53 kali	
2.	Program Peningkatan Pembinaan Masyarakat Perikanan dan Kelautan								UPTD PERBENIHAN PERIKANAN UPTD LAB. UPTD P4 SDI
	- Pelatihan/integrasi nelayan dan pembudidayaan ikan;	150	200	250	265	270	280	1.415 orang	
	- Seleksi Taruna/Taruni sekolah tinggi perikanan	10	10	10	10	10	10	60 orang	

## D. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET						JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006		
1.	Program Pengembangan dan Peningkatan Aspek Informasi Sumberdaya Pertambangan dan Energi - Bimbingan dan penyuluhan usaha pertambangan; - Pembinaan dan pengawasan usaha ketenaga kerjaan; - Penyediaan informasi potensi geologi dan sumberdaya mineral; - Penyuluhan konservasi energi; - Pemantauan BBM dan minyak pelumas; - Studi kebutuhan energi.	-	-	7	4	7	7	25 Keg.	DISTANBEN
		-	-	7	4	7	7	25 Keg.	
		-	300	350	300	350	200	1.500 paket	
		-	7	7	3	7	7	31 Keg.	
		-	7	7	3	7	7	31 Keg.	
		-	7	7	2	7	7	30 Keg	
2.	Program Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Energi - Survei/peyelidikan gerakan tanah dan mitigasi bencana alam; - Survei/peyelidikan potensi sumber daya mineral; - Survei/peyelidikan potensi sumberdaya energi baru dan terbarukan; - Penyuluhan daerah rawan bencana alam beraspek geologi; - Inventarisasi potensi sumberdaya mineral; - Pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan bahan baku industri.	-	5	5	2	5	5	22 Keg	DISTANBEN
		-	7	7	7	7	7	35 Keg	
		-	7	7	1	7	7	29 Keg	
		-	3	2	2	3	3	13 Keg	
		-	3	3	1	3	3	13 Keg	
		-	-	-	-	1	1	2 paket	DISTANBEN
3.	Program Pengembangan Energi Kelistrikan - Inventarisasi energi surya, air, angin & panas bumi; - Investasi/ uji petik kelistrikan daerah kab/kota; - Pembangunan kincir angin.	-	-	-	-	10	10	20 Keg.	
		-	-	-	-	10	10	20 Keg	
		-	-	-	1	4	1	6 paket	



E. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET						JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006		
1.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan - Peningkatan pengawasan dan pengendalian produksi hasil hutan (pelatihan penyadapan getah pinus).	3 (150)	3 (150)	3 (150)	3 (150)	3 (150)	3 (150)	18 Angkat (900) orang	DISHUT
2.	Program Pengembangan Agribisnis - Peningkatan produksi perkebunan; - Pembinaan kelembagaan petani.	349.545 -	356.168 -	336.855 -	398.831 -	406.608 1	414.944 1	2.262.951 ton 2 paket	DISTANBUNAK

## F. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET					JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat - Fasilitas showroom kerajinan dan promosi dagang, industri dan investasi; - Pelatihan CEFE, Achievement Motivation Training (AMT); - Koordinasi pengembangan jaringan pasar.	-	1	6	5	5	22 kali 200 org 6 paket	DISINDAGKOP  BIRO EKBANG
2	Program Pematapan Struktur Industri - Penyusunan rencana pembinaan dan pendataan industri; - Pengembangan warung sistem informasi (WARSII); - Bantuan sarana produksi, penyebarluasan informasi industri; - Pembuatan homepage industri; - Pameran dekranas; - Renovasi dan pemeliharaan gedung dekranas; - Profil produk komoditi unggulan; - Inkubator bisnis; - Magang; - Kemitraan; - Pemasyarakatan HAKI; - Pengembangan BPSMB; - Pelatihan peningkatan mutu produk; - Pelatihan manajemen mutu produk; - Pasar spesifikasi kerajinan di lokasi ex. MTQ; - Revitalisasi UPT kayu, mebel & sarung Donggala; - Monitoring dan evaluasi.	-	2	3	2	2	11 kali 95 paket  21 paket 5 paket 11 kali 4 paket 5 paket 2 Keg. 14 kali 6 kali 12 kali 23 keg. 1.164 org 40 org 4 paket 6 paket 10 kali	DISINDAGKOP

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET						JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006		
3.	Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan promosi dagang dan investasi dalam dan luar negeri;</li> <li>- Pemantauan barang beredar;</li> <li>- Melakukan temu konsultasi dengan produsen, distributor dan lembaga/ instansi terkait;</li> <li>- Pemantauan barang penting dan strategis.</li> </ul>	-	2	2	1	2	2	9 kali 20 paket (kab/kota)	DISINDAGKOP
		-	-	-	-	10	10		
		-	1	1	0	2	2	6 kali	
		-	-	-	-	10	10	20 paket (kab/kota)	
4.	Program Pengembangan Kemetrologian <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kemetrologian.</li> </ul>	-	1	1	1	1	1	5 paket	

G. BIDANG PERKOPERASIAN

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET					JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1.	Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat - Penyusunan rencana pembinaan perdagangan; - Penyusunan direktori perusahaan dan penyebarluasan informasi pasar; - Pelatihan ekspor; - Penyusunan rencana pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi; - Pendatang; - Pameran dagang tingkat daerah & nasional; - Temu usaha kemitraan antar PKMK & perbankan/ lembaga keuangan lainnya yang berkaitan dengan simpan pinjam.	-	2	2	2	2	2	DISINDAGKOP
		-	1	1	1	1	1	10 kali
		-	30	20	20	20	20	5 paket 110 orang
		-	2	2	2	2	2	10 Keg
		-	3	3	3	3	3	15 kali
		-	2	2	2	2	2	10 perish
		-	-	-	-	25	25	50 orang
2.	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Kewirausahaan PKMK - Pelatihan kewirausahaan pengelola BDS; - Diklat KSP/USP penerima data; - Diklat pengembangan sentra; - Sosialisasi perkoperasian; - Bantuan tenaga ahli perkoperasian; - Koordinasi dengan pemda, bakopinwil, instansi terkait, kadin dan koperasi sekunder dalam rangka pendataan dan penguatan kelembagaan PKMK; - Pelatihan manajemen usaha; - Pelatihan akutanasi; - Dukungan peran usaha distribusi/pertokoan dan perkreditan simpan pinjam pasar rakyat; - Bantuan permodalan/ penjaminan.	-	-	-	-	-	-	DISINDAGKOP
		-	-	-	-	20	20	40 orang
		-	-	-	-	20	20	40 orang
		-	-	-	-	20	20	40 orang
		-	-	-	-	40	40	80 orang
		-	-	-	-	3	5	8 orang
		-	2	2	2	2	2	10 kali
		-	20	20	20	20	20	100 orang
		-	20	20	20	20	20	100 orang
		-	1	1	1	1	1	5 keg
		-	1	1	-	1	1	4 paket

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET					JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
3.	Program Pembinaan Usaha Makro, Kecil, Menengah dan Koperasi - Koordinasi pengembangan dan penataan sentra industri kecil, menengah, koperasi/ BUMD/ Swasta dan produk unggulan daerah.	1	1	1	1	1	1	6 paket  BIRO EKBANG

# H. BIDANG PENANAMAN MODAL

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET					JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1.	Program Penataan Sistem Pelayanan Perizinan Penanaman Modal - Sosialisasi kebijakan perizinan dan pembinaan PMDM dan PMA.	1	1	1	1	1	1	BKPM
2.	Program Peningkatan Promosi Potensi Investasi Daerah - Promosi kerjasama dan investasi.	1	1	1	1	1	1	BKPM
3.	Program Pengembangan Interkoneksi Penanaman Modal - Perencanaan, pengkajian, pengembangan, evaluasi dan pemutakhiran data potensi produk komoditi unggulan dan investasi daerah.	1	1	1	1	1	1	BKPM
4.	Program Pembinaan dan pengendalian Penanaman Modal - Peningkatan operasi satuan gugus tugas penanaman modal; - Pengendalian dan evaluasi kinerja PMDM dan PMA	16	1	1	1	1	1	BKPM BKPM
5.	Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal - Penyusunan database dan website BKPM Sulawesi Tengah.	2	2	1	1	1	1	BKPM

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET					Jumlah 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1.	Program Perluasan dan pengembangan Kesempatan Kerja - Bimbingan Lanjutan tenaga kerja pemuda mandiri profesional (TKPMP) dan tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT) - Bimbingan dan panduan teknologi padat karya (BPTPK) - Bimbingan teknis pelugas informasi pasar kerja (IPK) dalam rangka perencanaan tenaga kerja daerah - Penyusunan rencana tenaga kerja daerah - Penyuluhan AKL, AKAD, AKAN, TKW NAP dan pembinaan pengendalian TKI bermasalah	-	40	30	30	30	30	DINAS NAKERTRANS
		-	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	160 orang 19.350 HOK 160 orang
		-	40	30	30	30	30	160 orang
		-	1	1	1	1	1	5 paket
2.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Penyuluhan produktivitas tenaga kerja lembaga latihan swasta - Penyuluhan akreditasi lembaga latihan swasta - Pembinaan dan pengembangan lembaga latihan swasta - Monitoring lulusan pemagangan di kab dan kota - Penyuluhan pemagangan ke luar negeri - Bimbingan teknik peningkatan produktivitas - Sosialisasi peraturan perundangan pelatihan kerja - Pelatihan pengelola pelatihan kerja - Pelatihan produktivitas nelayan - Pelatihan produktivitas penjahit pakaian - Peningkatan fasilitas sarana pelatihan	-	40	30	30	30	30	DISNAKERTRANS
		-	40	30	30	30	30	160 orang 160 orang 160 orang 160 orang 160 orang 160 orang 125 orang 125 orang 125 orang 125 orang 2 paket
		-	40	30	30	30	30	160 orang
		-	40	30	30	30	30	160 orang
		-	40	30	30	30	30	160 orang
		-	40	30	30	30	30	160 orang
		-	40	30	30	30	30	160 orang
		-	25	25	25	25	25	125 orang
		-	25	25	25	25	25	125 orang
		-	25	25	25	25	25	125 orang
		-	25	25	25	25	25	125 orang
		-	-	-	-	1	1	2 paket

[illegible]



No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET					Jumlah 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1.	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan - Peningkatan tenaga kesehatan 1. Penetapan dokter PTT 2. Penarikan dan seleksi Dr. Pasca PTT 3. Penetapan Dr. ahli PPDS 4. Pelatihan pra tugas Dr. PTT 5. Pendidikan dokter spesialis 6. Penetapan NAKES lainnya 7. Pendidikan lanjutan S-1 keperawatan 8. Pendidikan pra jabatan - Konsultasi pusat, pembinaan dan pengawasan program - Optimalisasi kapasitas UPT Bapelkes	40 35 8 40 0 30 0 60 - 1	50 40 10 50 5 40 5 80 - 1	50 50 10 50 5 35 5 70 - 1	40 50 10 40 5 35 5 60 4 1	40 40 10 40 5 35 5 60 4 1	35 40 10 35 5 35 5 55 4 1	DINKES                       BAPELKES
2.	Program Peningkatan Upaya Kesehatan - Peningkatan upaya kesehatan dasar - Peningkatan upaya kesehatan rujukan - Peningkatan upaya kesehatan khusus dan instalasi medik - Peningkatan upaya kesehatan keluarga - Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular - Pengembangan obat dan pengobatan tradisional - YANKES bagi GAKIN korban kerusuhan dan bencana - Penyuluhan keswastmas (Kesejahteraan Jiwa Masyarakat) - Mengikuti program akreditasi RS - Melakukan QA pelayanan medik - Melakukan QA pelayanan perawatan	1 1 1 1 1 2 - - - -	1 1 1 1 1 2 - - - -	1 1 1 1 1 2 - - - -	1 1 1 1 1 2 - - - -	1 1 1 1 1 2 - - - -	6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 12 paket 48 kali 5 standar 16000 pasien 16000 pasien	DINKES                       BADAN RSJ MADANI

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET					Jumlah 2001-2006	INSTANSI	
		2001	2002	2003	2004	2005			2006
3	- Melakukan survey kepuasan pelayanan pasien	-	-	4	4	4	4	16 kali	BADAN RSJ MADANI
	- Memperluas program integrasi	-	-	20	20	20	20	80 kali	
	- Mengefektifkan sistem rujuk	-	-	12	12	12	12	48 kasus	
	- Pengembangan pelayanan laboratorium	-	-	360	400	400	450	1610 paket	
	- Pengembangan pelayanan farmasi	-	-	23.000	23.200	23.300	23.300	92.800 resep	
	- Pengembangan pelayanan gizi	-	-	700	750	750	750	2950 resep	
	- Pengembangan pelayanan elektromedik	-	-	500	600	650	650	2400 pasien	
	- Pengembangan pelayanan rawat jalan	-	-	4.000	4.000	4.000	4.100	16100 pasien	
	- Pengembangan pelayanan rehabilitasi	-	-	500	500	500	500	2000 pasien	
	- Pengembangan pelayanan gawat darurat	-	-	500	500	500	500	2000 pasien	
	- Pengembangan pelayanan rawat inap	-	-	700	750	750	750	700 pasien	
	- pengaktifan gugus kendali mutu RS	-	-	6	8	12	17	43 jml GKM	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	8	8	8	8	8	8	48 paket (kab)	
4	Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	1	1	1	1	1	1	6 paket	DINKES
	- Penyediaan obat-obat sangat esensial	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Pengawasan obat, makan yang berbahaya	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Pembinaan obat, makan yang berbahaya	1	1	1	1	1	1	6 paket	
5	Program Peningkatan Lingkungan Sehat, Prilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	1	1	1	1	6 paket	DINKES
	- Pengembangan kawasan lingkungan sehat	8	8	8	8	8	8	48 paket (kab)	
	- Pengembangan kemitraan dengan lintas sektor, LSM, tokoh masyarakat dan swasta	8	8	8	8	8	8	48 paket (kab)	
	- Peningkatan kepedulian terhadap perilaku hidup bersih dan sehat	8	8	8	8	8	8	48 paket (kab)	
	- Konsultasi, pembinaan dan pengawasan program	3	3	3	3	3	3	18 kali	

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET						JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006		
6.	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan - Peningkatan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan - Peningkatan manajemen sistem informasi - Pembinaan penelitian bidang kesehatan	1 - -	1 - -	1 - -	1 4 4	1 4 4	1 4 4	6 paket 12 kali 12 kali	DINKES DINKES, BAPELKES BADAN RSU UNDATA & BADAN RSJ MADANI

K. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET						JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006		
1.	Program Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah - Pembinaan dan peningkatan Pendidikan TK dan SD - Pembinaan dan peningkatan Pendidikan luar biasa	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	12 paket 6 paket	DIKJAR
2.	Program Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan Menengah dan Kejuruan - Pembinaan dan peningkatan Pendidikan menengah	1	1	1	1	1	1	6 paket	DIKJAR
3.	Program Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan Luar sekolah - Pembinaan dan peningkatan Pendidikan anak usia dini - Pembinaan dan peningkatan serta pengembangan PLS - Pembinaan dan peningkatan serta pengembangan kegiatan belajar (BPKB) - Pembinaan dan peningkatan serta pengembangan PLSP - Pengembangan dan uji coba model - Peningkatan layanan publik	1 1 - 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	6 paket 6 paket 5 keg. 6 keg. 6 keg.	DIKJAR UPTD BPKB DIKJAR UPTD BTKIP
4.	Program Peningkatan Pengkajian, Pengembangan Mutu Pendidikan dan Kerjasama - Pengkajian pengembangan pendidikan - Peningkatan dan pemasyarakatan mutu pendidikan	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	6 paket 6 paket	DIKJAR
5.	Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga - Pekan olahraga penyandang cacat Ting. Nasional	-	-	-	-	1	1	2 paket	

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET						JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006		
6.	- Festival olahraga tradisional	-	-	-	-	1	1	2 paket	DIKJAR
	- Pekan olahraga pelajar tingkat nasional (Kopnas)	-	-	-	-	1	1	2 paket	
	- Monitoring Sosialisasi Olahraga Masyarakat dan tradisional	-	-	-	-	1	1	2 paket	
	- Pertukaran pemuda ASEAN	-	-	-	-	1	1	2 paket	
	- Peningkatan hari-hari besar nasional	-	-	-	-	1	1	2 paket	
	- Pembinaan kelompok belajar	-	-	-	-	1	1	2 paket	
	- Pelatihan perintis pemuda	-	-	-	-	1	1	2 paket	
	- Pekan olah raga pedesaan/kelurahan	-	-	-	-	1	1	2 paket	
7.	Program Pembinaan dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan	-	-	-	-	1	1	2 paket	BANDIKLAT
	- Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan NAPZA	-	-	-	-	1	1	2 paket	
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Bidang Penjenjangan	1	1	1	1	1	1	6 paket	
8.	- Bidang teknis fungsional	1	1	1	1	1	1	6 paket	BANDIKLAT DAN BIRO HUKUM
	- Bidang manajemen pemerintahan	-	-	-	-	1	1	2 paket	
	- Peningkatan Kualitas SDM dalam pemahaman peraturan daerah (legislasi daerah)	-	-	-	-	1	1	2 paket	DIKJAR BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	-	-	-	-	1	1	2 paket	
	- Pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Pembinaan dan Pengembangan koleksi perpustakaan	-	-	-	-	1	1	2 paket	150 unit 25 buah
	- Pembinaan dan pengembangan kelembagaan perpustakaan :	0	30	30	30	30	30	5	
	1. Pembinaan teknis perpustakaan	0	5	5	5	5	5	5	
	2. Taman bacaan masyarakat								

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET						JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006		
	- Peningkatan pelayanan minat baca masyarakat - Peningkatan layanan perpustakaan (dokumentasi dan informasi): 1. layanan perpustakaan keliling 2. hunting terbitan tentang Sulawesi tengah 3. penerbitan	1	1	1	1	1	1	6 paket	
9.	Program Peningkatan Promosi Pariwisata Daerah - Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata	0	0	34	34	34	34	126 pos 25 Expl. 45 Expl.	
10.	Program Pelastartandan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian - Pembinaan peninggalan sejarah permuseuman dan purbakala - Peningkatan Apresiasi mutu dan frekuensi seni budaya daerah - Pembinaan peningkatan sejarah permuseuman purbakala	2	2	2	2	2	2	12 paket	DISBUDPAR
		1	1	1	1	1	1	6 paket	UPTD MUSEUM
		1	1	1	1	1	1	6 paket	UPTD TAMAN BUDAYA
11.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pendidikan - Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana pendidikan	1	1	1	1	1	1	6 paket	
		-	-	-	-	3	3	6 paket	DIKJAR

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET					JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1.	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan dan penanggulangan NAPZA</li> <li>- Pembinaan kesejahteraan sosial</li> <li>- Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat</li> <li>- Kesiapsiagaan penganggulangan bencana dan pengungsi</li> <li>- Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial</li> <li>- Pelayanan lanjut usia</li> <li>- Pelayanan dan bimbingan anak putus sekolah, ekonomi lemah dan tertinggal</li> <li>- Pelayanan dan bimbingan wanita tuna susila</li> <li>- Penyuluhan dan bimbingan sosial daerah kumuh</li> <li>- Penyuluhan dan bimbingan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran</li> </ul>	1 1 - - - 100 140 40 -	320 1 - - - 100 135 40 -	358 1 - 250 - 100 140 30 -	423 1 95 250 300 100 120 30 400	485 50 100 300 350 100 140 30 450	575 50 125 350 400 100 140 30 500	DINKESOS     PSTW MADAGO UPTD PSBRKW DISKESOS
2.	Program Kereserian Publik dalam Penanganan Masalah Sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan karang taruna</li> <li>- Pembinaan kesos komunitas adat terpencil (KAT)</li> <li>- Penumbuhan dan pembinaan ordes</li> <li>- Pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan</li> <li>- Pengawasan dan evaluasi sumbangan sosial</li> </ul>	- - - - -	50 162 50 1 -	57 186 57 1 -	63 213 65 1 73	74 275 74 1 100	100 300 100 1 150	DISKESOS    BPMD
3.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas hidup perempuan</li> </ul>	1	1	1	1	1	1	6 paket

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET						JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006		
4.	Program Peningkatan Peran Masyarakat dalam Kemampuan Kelembagaan dan Pengarus-Utamaan Gender								
	- Sosialisasi pengurus utama gender (PUG)	1	1	1	1	1	1	6 paket	BPMD
	- Pelaksanaan jambore PKK	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Bimbingan teknis PKK	8	9	9	10	10	10	56 paket (Kota/kab.)	
	- Pembentukan kelompok sosial penanggulangan narkoba, PAR, AIDS.	-	-	-	10	10	10	30 paket (Kota/kab.)	
	- Sosialisasi penanggulangan narkoba, PAR, AIDS, dan konvensi anak	-	-	-	1	1	1	3 paket	BPMD
	- Pembentukan sistem informasi posyandu	-	-	1	1	1	1	4 paket	
	- Simulasi P2LDT	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Pelatihan manajemen kader PKK	1	1	1	1	1	1	6 Angkt	
	- Pelaksanaan TOT gender	-	-	-	1	1	1	3 Angkt	
	- Pelatihan UP2K-PKK	1	1	1	1	1	1	6 Angkt	
	- Pelaksanaan lomba-lomba 10 program pokok PKK, TOGA, BKB, UPGK Posyandu lansia, GSI, UP2K-PKK, KB-KES	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Pelaksanaan rakornas/sekretariat TP-PKK	8	9	9	10	10	10	56 paket (Kota/kab.)	
	- Konsultasi PKK Pusat	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Rakornas PKK	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Dukungan operasional pemberdayaan kader	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Monitoring dan evaluasi 10 Program PKK	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Dukungan operasional TP-PKK Propinsi	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Penataan LPM, LKMD, lembaga adat dan profil desa	1	1	1	1	1	1	6 paket	



No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET					JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
5.	Program Pembinaan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama - Pembinaan Kerukunan Antar umat beragama - Pembinaan dan Pelatihan seni baca kitab suci dan kelembagaan keagamaan se suliteng - Peningkatan layanan sarana keagamaan	9	9	9	9	9	9	BIRO EKBANG
		6	6	6	6	6	6	
		-	-	-	-	1	1	
							54 paket 36 paket 2 paket	

## 108

108

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET						JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006		
2.	Program Pembangunan daerah								
	- Pengembangan kerjasama/kemitraan pembangunan interkoneksi (kerjasama lintas wilayah, lintas instansi dan lintas program)	2	2	2	2	2	2	12 paket	BAPPEDA
	- Dukungan pengembangan wilayah pertanian terpadu, sulawesi agriculture area development project (SAADP)	8	8	8	-	-	-	24 Klp.	
	- Dukungan Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project (CSIADCP)	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Dukungan marine and coastal resources Management Project (MCRMP)	1	1	1	1	1	1	6 paket	BAPPEDA
	- Pembinaan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP)	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Dukungan Pembinaan Keberlanjutan Program SAADP	-	-	-	1	1	1	3 paket	
	- Dukungan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Mikro, Sustainable Micro Finance Project (SMFP)	-	-	-	-	1	1	2 paket	
	- Dukungan IFAD	-	-	-	-	1	1	2 paket	
	- Pengelolaan Kawasan Andalan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Dukungan CERD	1	1	1	1	1	1	6 paket	BPMD
	- Dukungan Komite Penganggulan Kemiskinan (KPK)	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Dukungan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA	1	1	1	1	1	1	6 paket	
	- Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	1	1	1	1	1	1	6 paket	

N. BIDANG PERMUKIMAN

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET						JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006		
1.	Program Pembinaan Pengawasan Kawasan - Pemberdayaan kawasan transmigrasi - Monitoring jaminan hidup/usaha ekonomi - Evaluasi perkembangan UPT dan kesejahteraan transmigrasi - Koordinasi Perencanaan Kawasan Transmigrasi - Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Kawasan Pengembangan Permukiman di kabupaten dan kota - Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) antar daerah	-	-	500	500	500	500	2.000 KK 59 UPT 44 kali 18 paket (kota/kab.) 18 paket (kota/kab.)	DISNAKERTRANS
2.	Program Perencanaan Perumahan dan Permukiman - Perencanaan teknis perumahan dan permukiman - Penyusunan pedoman penataan bangunan setempat - Sosialisasi dan peningkatan paradigma baru pembangunan kawasan transmigrasi dan peningkatan layanan transmigrasi - Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi bidang pengembangan kakao	-	1	1	1	1	1	5 paket 6 paket	DISKIMPRASWIL
3.	Program Perencanaan Perumahan dan Permukiman - Perencanaan teknis perumahan dan permukiman - Penyusunan pedoman penataan bangunan setempat	-	1	1	1	1	1	5 paket 6 paket	DISKIMPRASWIL

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET						JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006		
1.	Program Pembangunan Jalan - Pembangunan jalan	-	-	-	-	60	70	130 KM	DISKIMPRASWIL
2.	Program Pemeliharaan dan Peningkatan jalan dan Jembatan - Pemeliharaan rutin jalan - Pemeliharaan berkala jalan - Peningkatan jalan - Pemeliharaan jembatan - Penggantian jembatan - Perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan - Penanggulangan bencana alam di sulteng - Perencanaan umum dan pembinaan program peningkatan jalan dan jembatan	- - 27,5 - 219,60 1 1 1	1.376,38 325,00 56,78 325,00 92,00 1 1 1	682,06 15,00 56,80 650,00 60,00 1 1 1	1.693,06 20,00 63,78 250,00 90,00 1 1 1	660,06 30,00 45,50 250,00 150,00 1 1 1	1.667,56 40,00 45,50 250,00 560,00 1 1 1	1.667,57 KM 40,00 KM 295,00 KM 1.725,00 M 1.171,60 M 6 paket 6 paket 6 paket	DISKIMPRASWIL      BAPPEDA
3.	Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan - Pembiayaan, penyuluhan dan pengembangan kemampuan teknis P3A - Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi - Perencanaan teknis program sumberdaya air - Perencanaan umum dan pembinaan program sumberdaya air - Perencanaan umum dan pengendalian pembinaan IPAIR dan operasional pemeliharaan pengairan (Dana Pendamping Irigasi?PKPI (Grand Tr-027755)	- 5.839 - 8 84	32 7.600 - 8 35	56 7.600 - 8 35	56 7.600 - 8 35	56 15.000 1 10 35	56 15.000 1 10 35	256 Klp. 15.000 Ha 2 paket 52 paket (kab/kota) 175 Klp.	DISKIMPRASWIL   BAPPEDA

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET					JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
4.	Program Penanganan Banjir dan Pengamanan Pantai - Pengendalian banjir dan pengamanan pantai	-	-	1	2	4	4	DISKIMPRASWIL 11 paket
5.	Program Pengelolaan Pelayanan Peralatan Berat dan Uji Coba Laboratorium - Pengelolaan Pelayanan peralatan berat dan uji coba laboratorium - Pemeliharaan peralatan berat, kendaraan dan laboratorium - Pengkajian kualitas dan kualitas potensi bahan bangunan galian C	-	-	2	2	2	2	UPD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN 8 paket 8 paket 7 paket
6.	Program Peningkatan Pengawasan Konstruksi - Pengawasan Uji mutu konstruksi	-	-	-	7	9	9	DISKIMPRASWIL 25 paket
7.	Program Pembinaan Administrasi Prasarana Jalan dan Jembatan - Menyusun leger jalan	-	-	-	-	1	-	DISKIMPRASWIL 1 paket

P. BIDANG PERHUBUNGAN

[illegible]

## 114

114



No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET					JUALAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
	- Pemeliharaan tata batas hutan (Orientasi & pemeliharaan batas kawasan hutan)	80	100	160	160	200	200	900 Km
	- Peningkatan pengamanan dan pengawasan hutan (Operasi pengamanan hutan terpadu)	12	16	4	8	10	10	60 kali
	- Pembinaan & pengembangan populasi habitat maleo	3	3	3	3	2	5	6 lokasi
	- Pengelolaan hutan mangrove	10	10	10	10	10	10	60 Ha
	- Pengembangan sistem informasi, komunikasi dan publikasi kehutanan	1	1	1	1	1	1	6 paket
	- Pemeliharaan dan pengembangan tanaman kehutanan	10	5	30	-	20	20	85 Ha
		60	70	75	105	125	125	peneliharaan 125 Ha
	- Pembangunan pilot Project budidaya tanaman rotan (P3BTR)							peneliharaan
	- Penanaman	-	-	200	200	200	300	900 Ha
	- Pemeliharaan	-	-	2	2	2	3	9 Kab.
4.	- Pengadaan bibit tanaman kehutanan (MPTS)	-	-	40.000	40.000	40.000	60.000	180.000 batang
	- Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pembentukan kader muda kehutanan.	-	-	200	200	200	300	900 Ha
		-	-	2	2	2	3	9 Kab.
		-	-	40.000	80.000	120.000	180.000	420.000 batang
		-	-	19.600	21.000	20.000	39.400	100.000 bibit
		-	-	3	3	3	3	12. angklt
		-	-	(150)	(150)	(150)	(150)	(600) org.
	Program Rehabilitasi Lahan Kritis							
	- Rehabilitasi hutan dan lahan :							
	Penanganan lahan kritis dengan dana DAK-DR Prov, pada lokasi (Tahura 120 Ha, Eks MTQ 20 Ha, arboretrum 90 Ha, kebun kopi 90 Ha, Maleali 57 Ha)	287	307	317	317	327	337	1.892 Ha (Kab Donggala, Parimo & Poso)

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET					JUMLAH 2001-2006	INSTANSI
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
5.	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup - Pengendalian dampak lingkungan - Pengkajian kuantitas sumberdaya air	8	8	8	8	8	8	BAPEDALDA 48 paket (kab./Kota) 6 paket
6.	Program Inventarisasi dan Evaluasi sumberdaya Darat - Inventarisasi Potensi Hutan Propinsi Sulawesi Tengah	-	-	-	-	9	9	UPTD Balai Pengujian dan Penelitian DISHUT 18 kel. hutan (9) kabupaten

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi rencana strategis pembangunan daerah melalui proses perencanaan pembangunan dan anggaran setiap tahunnya agar terwujud perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, menyeluruh, bertanggung jawab dan terkendali pelaksanaannya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melakukan koordinasi perencanaan pembangunan, anggaran serta pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan program pembangunan. Hasil perencanaan pembangunan dan anggaran yang diperoleh dari proses ini akan menjadi bahan Pemerintah Daerah dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setiap tahunnya.

Penyempurnaan Rencana Strategis merupakan penajaman fokus ke arah pemanfaatan program yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah harus bersungguh-sungguh melaksanakan program yang tertuang dalam RENSTRA ini dan selanjutnya pencapaian tujuan tahap awal memusatkan pada upaya pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan ekonomi yang mengutamakan penataan infrastruktur perekonomian yang berdampak pada peningkatan cadangan devisa daerah, penegakan supremasi hukum, pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial serta penataan lembaga-lembaga pemerintah daerah agar terselenggaranya fungsi pelayanan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Sulawesi Tengah sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

Demikian Penyempurnaan RENSTRA ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari sisa masa lima tahun yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Tatanan Masyarakat Madani sebagaimana dimaksud dalam Visi dan Misi Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 18 Januari 2005

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**ttd + cap**

**AMINUDDIN PONULELE**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 18 Januari 2005

**SEKERTARIS DAERAH PROPINSI  
SULAWESI TENGAH**

**ttd + cap**

**G U M Y A D I**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1  
TAHUN 2005 SERI E NOMOR 1**

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 5  
TAHUN 2005 SERI E NOMOR 2**